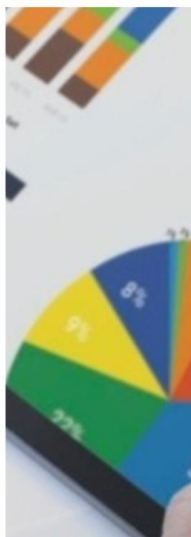
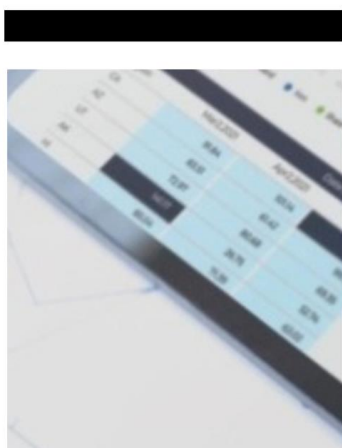
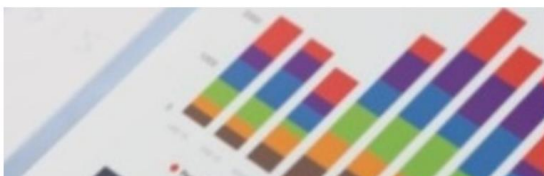


KINERJA BPOM DALAM ANGKA

TRIWULAN IV 2022



BADAN POM

**KINERJA BPOM
DALAM ANGKA TRIWULAN IV
TAHUN 2022**

SAMBUTAN KEPALA BPOM RI

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat Rahmad dan RidhoNya sehingga BPOM dapat terus hadir melayani dan melindungi masyarakat melalui jaminan Obat dan Makanan yang aman, berkualitas/bermanfaat, dan bermutu. Kinerja BPOM sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 dituangkan dalam “Kinerja BPOM Dalam Angka”. Buku ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban BPOM dalam pelaksanaan anggaran pemerintah dan juga sumber informasi tentang hasil - hasil pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam buku ini disampaikan hasil pengawasan Obat dan Makanan baik yang dilakukan BPOM sendiri maupun bermitra dengan pemangku kepentingan yang mencakup standardisasi, evaluasi *pre-market*, hingga pengawasan *post-market* yang disertai upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat. Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022, beberapa kinerja yang telah dicapai BPOM di antaranya adalah persetujuan 182.854 NIE, pemeriksaan terhadap 38.954 sarana produksi dan sarana distribusi, pengujian 82.477 sampel, 262 perkara, dan 635 kegiatan pelaksanaan KIE.

Tahun 2022 diharapkan menjadi momentum pemulihan ekonomi mengingat pandemi Covid-19 sudah mulai melandai. Untuk mendukung hal tersebut, BPOM semakin intensif dalam melakukan pendampingan terhadap UMKM supaya produk yang dihasilkan dapat bersaing di pasaran. Terima kasih kepada seluruh jajaran BPOM serta mitra kerja atas kinerja yang dicapai sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua mitra kerja BPOM sebagai bahan evaluasi bagi pelaksana kegiatan agar terus berupaya bersama meningkatkan kinerja pada masa mendatang dalam upaya melayani dan melindungi masyarakat.



Jakarta, 28 Februari 2023

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan,



Dr. Penny K. Lukito, MCP

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KEPALA BPOM R.I	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	v
HIGHLIGHT	1
HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN.....	5
I. Hasil Pengawasan Keamanan, Khasiat, dan Mutu Produk Obat dan Makanan	5
II. Hasil Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan.....	10
III. Penyusunan Standar/Regulasi/Pedoman	12
IV. Riset dan Kajian di Bidang Obat dan Makanan	15
V. Pengembangan dan Pengujian Obat dan Makanan	15
VI. Optimalisasi Pemberdayaan Mitra Kerja dan Masyarakat.....	18
VII. Digitalisasi Pelayanan Publik	26
VIII. Perkuatan Peraturan Perundang-Undangan Pengawasan Obat dan Makanan	32
IX. Penguatan dan Penataan Organisasi dan Tata Laksana serta Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	36
X. Kerjasama Internasional	38
XI. Sumber Daya Manusia	40
XII. Realisasi Anggaran Sampai dengan Triwulan IV 2022	41
XIII. Pemantauan Capaian Rencana Kerja Pemerintah (RKP) BPOM	42
PENUTUP.....	42
LAMPIRAN.....	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Profil Registrasi Obat dan Makanan	5
Gambar 2. Profil Pengawasan iklan Obat dan Makanan Sebelum Beredar/Dipublikasikan	5
Gambar 3. Profil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan	6
Gambar 4. Profil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan.....	6
Gambar 5. Profil Sertifikasi Obat dan Makanan.....	8
Gambar 6. Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan.....	8
Gambar 7. Profil Pengawasan Label Obat dan Makanan	9
Gambar 8. Peta Rawan Kasus Obat dan Makanan	10
Gambar 9. Jumlah Kegiatan Operasi Intelijen Berdasarkan Komoditi s.d Triwulan IV 2022.....	10
Gambar 10. Hasil Patroli Siber Obat dan Makanan s.d Triwulan IV 2022	11
Gambar 11. Profil Kemajuan Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia s.d Triwulan IV 2022 .	11
Gambar 12. Data Penerbitan Siaran Pers dan Penjelasan/Klarifikasi	18
Gambar 13. Realisasi Kegiatan Pelayanan Informasi kepada Media.....	18
Gambar 14. Total Unggahan Media Sosial BPOM Berdasarkan Platform.....	19
Gambar 15. Pertumbuhan Audiens per Platform	20
Gambar 16. <i>Engagement</i> Media Sosial pada Triwulan IV 2022	20
Gambar 17. <i>Top engagement content</i> terkait Badan POM pada <i>platform</i> Facebook, Twitter, Instagram dan Youtube pada Triwulan IV 2022	21
Gambar 18. Tren Tonasi Pemberitaan.....	21
Gambar 19. Diagram Sebaran Pemberitaan Badan POM di Media Triwulan IV 2022	22
Gambar 20. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan Triwulan IV Tahun 2022.....	23
Gambar 21. Profil Pengguna Layanan Informasi dan Pengaduan Badan POM Berdasarkan Profesi.....	24
Gambar 22. Profil Pengguna Layanan Informasi dan Pengaduan Badan POM Berdasarkan Jenis Media	25
Gambar 23. Profil Layanan Informasi dan Pengaduan yang Diberikan oleh Badan POM Berdasarkan Komoditi	25
Gambar 24. Topik Layanan Informasi dan Pengaduan yang Diberikan atau Ditanyakan kepada Badan POM	26
Gambar 25. Penyesuaian isian 2D Barcode dan Implementasi 2D Barcode.....	27
Gambar 26. Aktivitas dalam Percepatan Implementasi 2D Barcode.....	27
Gambar 27. Aktivitas pada BPOM Mobile	28

Gambar 28. Tampilan Sistem Informasi Pelaporan Terpadu 2022 29

Gambar 29. Pelaksanaan Exit Meeting Audit Sertifikasi, Resertifikasi, dan Surveilans QMS ISO 9001:2015 BPOM 11
Oktober 2022 37

Gambar 30. Realisasi Anggaran s.d Triwulan IV 2022..... 41

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan (Targeted)	7
Tabel 2. Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan (Random)	7
Tabel 3. Profil Laporan Efek Samping	9



BADAN POM

HIGHLIGHT

S.D TRIWULAN IV

Diundang Menjadi Guest Lecture Harvard University, Kepala BPOM Berbagi Pengalaman tentang Memimpin dan Berkolaborasi

Kepala BPOM RI menjadi dosen tamu (*guest lecture*) di Benjamin Waterhouse, Harvard University. Kehadiran Kepala BPOM ini dalam rangka menghadiri undangan dari Department of Global Health Delivery, Harvard Medical School (HMS), Harvard University untuk menjelaskan topik *Pandemic, Leadership, Collaboration, and Political Economy Dynamic in Indonesia National Health*. Pada kesempatan ini, Kepala BPOM memaparkan strategi dan kebijakan BPOM dalam menghadapi pandemi COVID-19 di Indonesia. Kegiatan ini turut dihadiri antara lain; Director of Global Health Delivery and Social Medicine Program Harvard Medical School, Joia Mukherjee; Professor of Global Health and Social Medicine Harvard Medical School; Byron Good dan Mary-Jo Good; dan Program Manager of the Department of Global Health Delivery and Social Medicine Harvard Medical School, Christina Lively.

Boston, Selasa (11/10/2022)



Kerja Sama BPOM Dampingi Pembentukan Otoritas Pengawas Obat dan Makanan Palestina Independen

BPOM bersama Kementerian Kesehatan Palestina yang diwakilkan oleh Menteri Luar Negeri Palestina telah melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU). Penandatanganan dilakukan di sela-sela pertemuan bilateral antara Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dan Perdana Menteri Palestina, Mohammad Shtayyeh di Istana Bogor. MoU tersebut memfasilitasi pendampingan BPOM dalam pembentukan Otoritas Pengawas Obat dan Makanan Palestina yang independen. Terkait kerja sama dengan Palestina, BPOM telah melakukan pendampingan dalam peningkatan kapasitas regulator Palestina melalui kerangka Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) dengan Kementerian Kesehatan Palestina selama 4 (empat) tahun berturut-turut. Kementerian Kesehatan Palestina juga telah meminta BPOM untuk mendampingi Pembentukan Otoritas Pengawas Obat dan Makanan

Bogor, Senin (24/10/2022)



Kolaborasi BPOM-Kejaksaan Agung dalam Penanganan Perkara Tindak Kejahatan Obat Tidak Memenuhi Standar

Jakarta, Rabu (16/11/2022)



Kunjungan Kepala Badan POM di Kejaksaan Agung dilakukan terkait kolaborasi dalam penanganan perkara tindak kejahatan obat yang tidak memenuhi standar. Kunjungan Kepala BPOM diterima langsung oleh Jaksa Agung RI, ST. Burhanuddin beserta jajaran. Terkait dengan hal tersebut, Jaksa Agung menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan BPOM dalam menindaklanjuti perkara kejahatan di bidang obat ini. Untuk memprosesnya, pihak Kejaksaan Agung akan memerlukan data-data dari pihak BPOM yang akan digunakan dalam pemeriksaan ke depannya. Pada kesempatan tersebut, BPOM juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak Kejaksaan Agung atas komunikasi dan kolaborasi yang telah terjalin dengan baik selama ini. Kepala BPOM mengungkapkan harapan agar kolaborasi ini dapat meningkatkan kualitas pengawasan obat dan makanan melalui tindakan tegas atas kejahatan di bidang obat dan makanan.

Kembangkan Fraksionasi Plasma Nasional, Dorong Kemandirian Produk Plasma Darah Dalam Negeri

BPOM menggagas pertemuan lintas sektor yang melibatkan Palang Merah Indonesia (PMI). Pertemuan yang dilaksanakan secara offline dan online tersebut dihadiri oleh Ketua Umum PMI, Jusuf Kalla; Praktisi WHO, Yuyun SM Soedarmono; Representative of Therapeutic Goods Administration (TGA) Australia, Dennis Dowhan; serta perwakilan Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D) Unit Transfusi Darah (UTD) PMI pusat dan provinsi; rumah sakit, dan industri farmasi. Kegiatan yang mengambil tema “Forum Lintas Sektor Pengembangan Industri Fraksionasi Plasma Dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian Produk Darah Dalam Negeri” bertujuan untuk menyinergikan dukungan dan upaya berkelanjutan bagi terwujudnya kemandirian produk darah dalam negeri. Bersamaan dengan kegiatan tersebut, Kepala BPOM dan Ketua Umum PMI melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) untuk memperbarui kerja sama antara BPOM dengan PMI untuk peningkatan mutu produk darah di Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (UDD PMI).

Jakarta, Selasa (22/11/2022)



BPOM Kawal Pemusnahan Sirup Obat Unibebi Mengandung EG/DEG di Cilegon

Cilegon, Selasa (06/12/2022)



Sebanyak 3.264 karton (223.560 botol) sirup obat Unibebi produksi PT Universal Pharmaceutical Industries (PT UPI) dimusnahkan di Kantor Pusat Pengelola Pemusnahan PT Wastec International. Pemusnahan di bawah pengawasan BPOM dilakukan dengan metode yang tidak menimbulkan penurunan kesehatan bagi manusia dan tidak mencemari lingkungan. Kepala BPOM RI, Penny K. Lukito mengatakan, pemusnahan dilakukan terhadap semua produk sirup obat hasil penarikan dari peredaran maupun yang masih dalam persediaan, termasuk untuk bahan baku pelarut yang tidak memenuhi syarat. Pemusnahan disaksikan petugas BPOM dan didokumentasikan dalam Berita Acara Pemusnahan.

BPOM Raih Penghargaan Indeks Reformasi Hukum Dengan Predikat Istimewa

Kepala BPOM RI, menerima penghargaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly atas pencapaian BPOM dalam menerapkan reformasi hukum. Penghargaan ini diserahkan secara langsung bersamaan dengan kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2022 yang diselenggarakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di Gedung Politeknik Ilmu Pemasarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim). Penghargaan ini berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian secara nasional oleh Tim Kemenkumham. BPOM meraih nilai Indeks Reformasi Hukum (IRH) BPOM Tahun 2022 sebesar 96.25 dengan kategori AA (Istimewa). Tercatat ada 4 variabel dan indikator penilaian yang telah ditentukan. Pertama adalah tingkat koordinasi Kemenkumham dalam harmonisasi regulasi. Kedua, Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai perancang peraturan perundang-undangan. Ketiga, kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan. Keempat, penataan *Database* Peraturan Perundang-undangan.

Tangerang, Kamis (15/12/2022)





BADAN POM

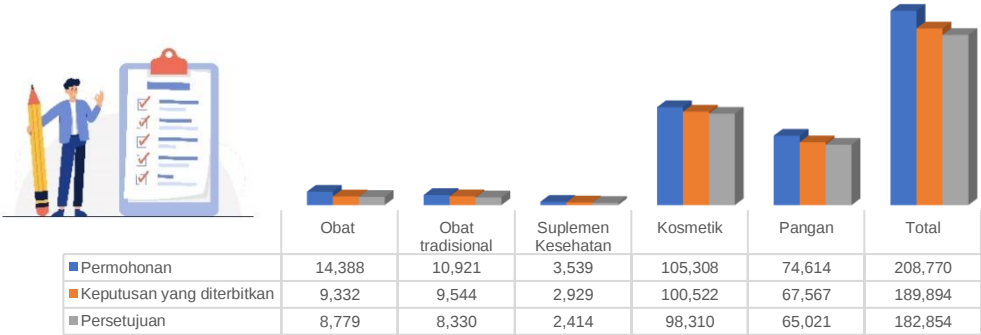
**HASIL KEGIATAN
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
SD TRIWULAN IV**

I. Hasil Pengawasan Keamanan, Khasiat, dan Mutu Produk Obat dan Makanan

Pengawasan Pre-market

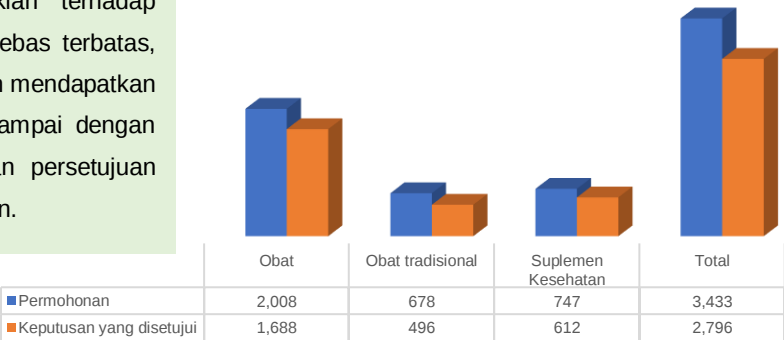
Sebelum Obat dan Makanan diproduksi atau diimpor dan diedarkan di wilayah Indonesia, Obat dan Makanan harus melalui registrasi oleh Badan POM untuk dievaluasi terkait aspek keamanan, khasiat dan mutu serta informasi melalui penandaan/label.

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2022, telah diterbitkan 189.894 keputusan dan 182.854 persetujuan izin edar dari 208.770 berkas permohonan registrasi Obat dan Makanan.



Gambar 1. Profil Registrasi Obat dan Makanan

Untuk melindungi masyarakat dari klaim yang menyesatkan, Badan POM telah melakukan evaluasi rancangan iklan terhadap kebenaran klaim iklan khusus obat bebas, obat bebas terbatas, obat tradisional dan suplemen kesehatan yang telah mendapatkan izin edar sebelum ditayangkan atau diedarkan. Sampai dengan Triwulan IV tahun 2022, dari 3.433 permohonan persetujuan rancangan iklan, telah disetujui 2.796 (81,44 %) iklan.



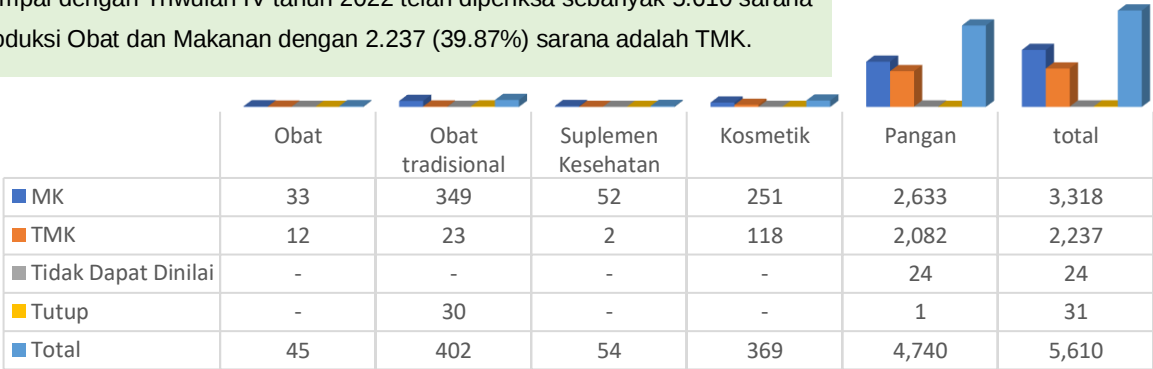
Gambar 2. Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan Sebelum Beredar/Dipublikasikan

Pengawasan *post-market* dilakukan setelah produk beredar untuk memastikan bahwa Obat dan Makanan yang beredar aman, berkhasiat dan bermutu serta informasi produk sesuai dengan yang disetujui, dilakukan melalui :

Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi

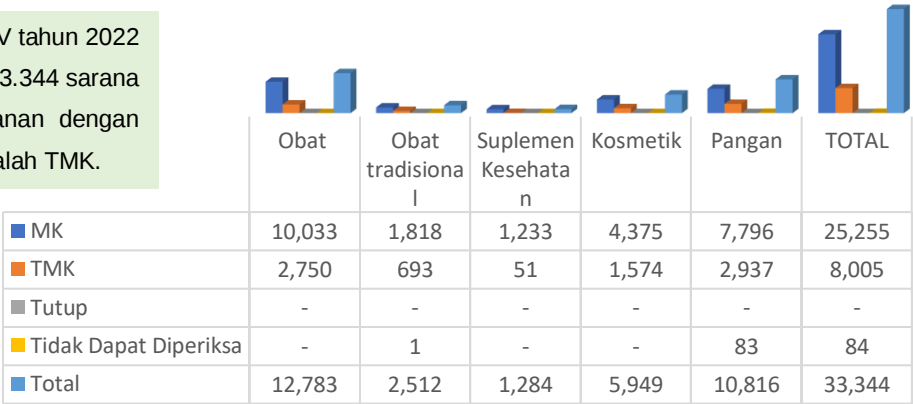
Badan POM melakukan pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan untuk menjamin kepatuhan implementasi Cara Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan Yang Baik.

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 telah diperiksa sebanyak 5.610 sarana produksi Obat dan Makanan dengan 2.237 (39.87%) sarana adalah TMK.



Gambar 3. Profil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 telah diperiksa sebanyak 33.344 sarana distribusi Obat dan Makanan dengan 8.005 (24,01%) sarana adalah TMK.



Keterangan
TMK : Tidak Memenuhi Ketentuan
MK : Memenuhi Ketentuan

Gambar 4. Profil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan



Sampling dan Pengujian Laboratorium

a. Targeted

Komoditi	Metode Sampling	Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji		Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar
			TIE/II egal/ Palsu	Kedaluarsa	rusak				MS	TMS*			
		(a)	(b)			(c)	(d=a-b)	(e=f+g)	(f)	(g)	(h=b+g)	(i=d-e)	(j=b+e)
Obat	Tageted	3.343	3	16	-	101	3.324	3.314	3.191	123	142	10	3.333
Obat tradisional	Tageted	3.920	3	-	-	469	3.917	3.904	3.203	701	704	13	3.907
kuasi	Tageted	245	-	-	-	31	245	243	215	28	28	2	243
Suplemen Kesehatan	Tageted	1.024	2	-	-	59	1.022	1.019	891	128	130	3	1.021
Kosmetik	Tageted	7.755	3	-	-	1.390	7.752	7.734	6.248	1.486	1.489	18	7.737
Rokok	Tageted	204	-	-	-	15	204	88	56	32	32	116	88
Pangan	Tageted	5.405	-	-	-	601	5.405	5.382	4.685	697	697	23	5.382

Tabel 1. Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan (Targeted)

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2022, dari 21.896 sampel *targeted* yang disampling terdapat 21.711 sampel yang selesai diperiksa dan diuji laboratorium, dimana 3.195 (14,72%) sampel tidak memenuhi syarat.

b. Random

Komoditi	Metode Sampling	Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji		Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar
			TIE/Ilegal/Palsu	Kedaluarsa	rusak				MS	TMS*			
		(a)	(b)			(c)	(d=a-b)	(e=f+g)	(f)	(g)	(h=b+g)	(i=d-e)	(j=b+e)
Obat	Random	13394	0	2	0	478	13.392	13.348	12977	371	373	44	13.350
Obat tradisional	Random	9004	16	0	0	1.064	8.988	8.981	7581	1.400	1.416	7	8.997
kuasi	Random	920	0	0	0	56	920	920	864	56	56	0	920
Suplemen Kesehatan	Random	2423	0	0	0	195	2.423	2.418	2071	347	347	5	2.418
Kosmetik	Random	18139	37	2	0	3.028	18.100	18.093	15063	3.030	3.069	7	18.132
Pangan	Random	17031	15	6	9	1.586	17.001	16.919	14730	2.189	2.219	82	16.949

Tabel 2. Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan (Random)

Sumber: Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) BB/BPOM Triwulan IV 2022

Keterangan:

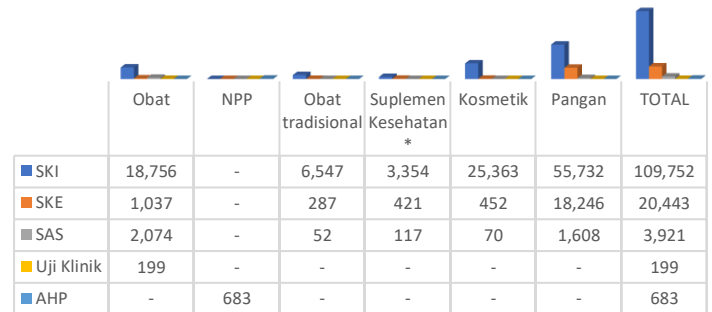
MS = Memenuhi Syarat

TMS = Tidak Memenuhi Syarat

TIE = Tanpa izin Edar

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2022, dari 60.911 sampel *random* yang disampling terdapat 60.766 sampel yang selesai diperiksa dan diuji laboratorium, dimana 7.393 (12,17%) sampel tidak memenuhi syarat.

Dalam rangka mendorong ekspor dan impor pengawasan produk dan bahan baku yang masuk ke wilayah Indonesia, Badan POM mengeluarkan Surat Keterangan Impor (SKI) dan Surat Keterangan Ekspor (SKE), SAS (*Special Access Scheme*), Uji Klinik, dan AHP (Analisa Hasil Pengawasan) Obat dan Makanan. Sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 telah diterbitkan 109.752 SKI, 20.443 SKE, 3.921 SAS, 199 Uji Klinik, dan 683 AHP Obat dan Makanan.

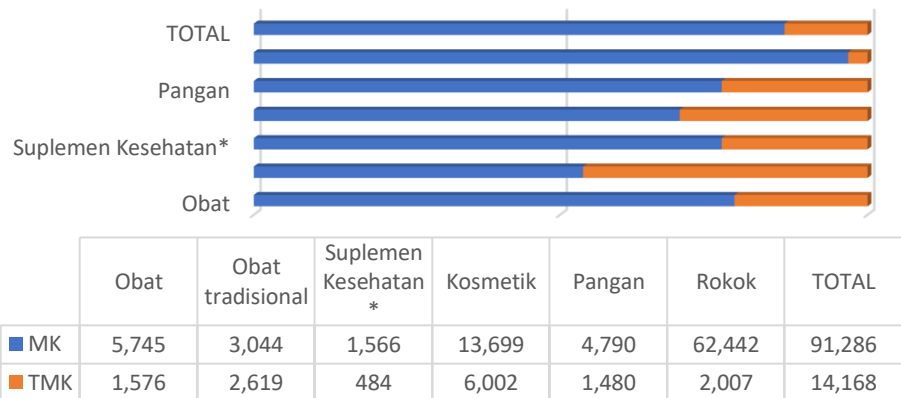


Gambar 5. Profil Sertifikasi Obat dan Makanan

Keterangan: * Termasuk Kuasi

Untuk mencegah masyarakat mendapatkan informasi yang salah dan menyesatkan tentang produk Obat dan Makanan, Badan POM melakukan pengawasan iklan produk di beberapa jenis media antara lain media cetak, televisi, radio, luar ruang dan *leaflet*/brosur. Sampai dengan Triwulan IV tahun 2022, dari 105.454 iklan Obat dan Makanan yang diawasi, 14.168 (13,43%) iklan tidak memenuhi ketentuan.

Pengawasan Iklan



Gambar 6. Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan

Pengawasan Label

Badan POM juga mengawasi kesesuaian label produk Obat dan Makanan yang beredar dengan yang telah disetujui Badan POM, agar tidak memberikan informasi yang salah dan menyesatkan kepada masyarakat. Sampai dengan Triwulan IV tahun 2022, dari 119.359 label Obat dan Makanan yang diawasi, sebanyak 11.726 atau sekitar 9,82% label tidak memenuhi ketentuan.



	Obat	Obat tradisional	Suplemen Kesehatan*	Kosmetik	Pangan	Rokok	TOTAL
■ MK	48,376	11,447	3,116	21,527	17,695	5,472	107,633
■ TMK	291	1,758	253	3,679	5,072	673	11,726

* Termasuk Kuasi

Gambar 7. Profil Pengawasan Label Obat dan Makanan

Monitoring Efek Samping Obat (MESO), Monitoring Efek Samping Obat Tradisional (MESOT), Monitoring Efek Samping Suplemen Kesehatan (MESSK), Monitoring Efek Samping Kosmetik (MESKOS)



	Jumlah Laporan	Jumlah laporan Tindakanjutt	%
Obat	10.749	8.939	83,16
Obat Tradisional	40	40	100,00
Suplemen Kesehatan	35	35	100,00
Kosmetik	503	497	98,81

Tabel 3. Profil Laporan Efek Samping

Penggunaan Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik oleh berbagai kalangan masyarakat, maka resiko timbulnya efek yang tidak diinginkan tetap ada. Oleh karena itu, Badan POM melakukan evaluasi aspek keamanan produk yang beredar terhadap seluruh laporan efek samping yang diterima dari masyarakat dan/atau tenaga kesehatan, dengan membentuk Tim/Panitia:

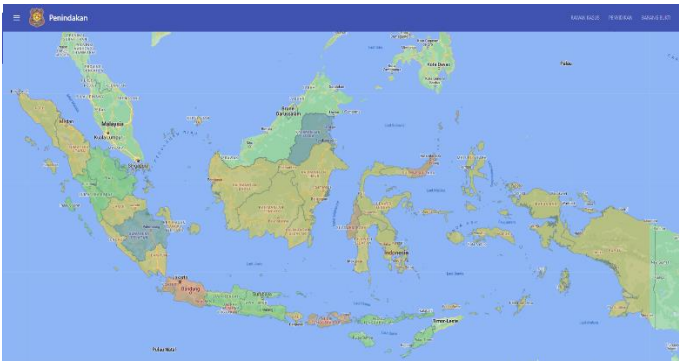
- MESO, MESOT, dan MESSK terdiri dari ahli farmakologi/farmakologi klinik dan beberapa tenaga ahli lainnya.
- MESKOS terdiri dari dokter spesialis kulit.

II. Penindakan di Bidang Obat dan Makanan

1. Peta Rawan Kasus Obat dan Makanan

Dalam melaksanakan strategi pencegahan kejahatan Obat dan Makanan, diperlukan basis data yang solid untuk kemudian dianalisis dan menjadi dasar dalam menentukan kebijakan. Untuk membangun basis data tersebut, Badan POM menyusun aplikasi peta rawan kasus, yaitu peta yang menggambarkan kondisi terkini kerawanan kejahatan Obat dan Makanan yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia.

Sampai dengan Triwulan IV 2022, data kasus yang sudah diverifikasi untuk menghasilkan peta rawan kasus yang aktual sebanyak 3.814 kasus yang terdiri dari 1.042 kasus terkait obat, 767 kasus terkait obat tradisional, 58 kasus suplemen kesehatan, 1.507 kasus terkait kosmetik dan 440 kasus terkait komoditi pangan. Data rawan kasus Obat dan Makanan tertinggi terdapat di provinsi Gorontalo dengan jumlah total 442 kasus..

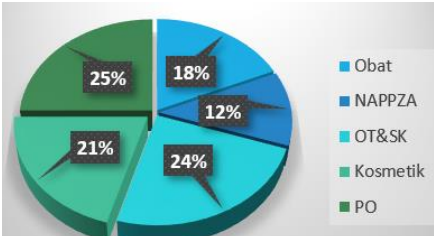


Gambar 8. Peta Rawan Kasus Obat dan Makanan

2. Hasil Operasi Intelijen

Peran Badan POM dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan sangat strategis seiring dengan masih banyaknya temuan terkait Obat dan Makanan ilegal baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi ketahanan dan kesehatan masyarakat Indonesia. Salah satu upaya BPOM untuk meminimalisir hal tersebut adalah dengan melakukan kegiatan/operasi intelijen guna meningkatkan pengawasan peredaran Obat dan Makanan baik di premarket maupun postmarket. Kegiatan/operasi intelijen telah dilaksanakan di berbagai daerah dengan berbagai kasus komoditi di antaranya kasus obat, NAPPZA, obat traditional, suplemen kesehatan, dan pangan olahan baik yang berujung ditindaklanjuti dengan saksi administrasi maupun projusticia.

Jumlah Laporan Kegiatan dan Operasi Intelijen				
Obat	NAPPZA	OT&SK	Kosmetik	PO
66	43	87	74	90

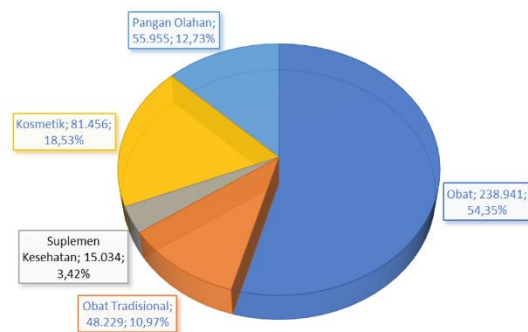


Gambar 9. Jumlah Kegiatan Operasi Intelijen Berdasarkan Komoditi s.d Triwulan IV 2022

3. Hasil Patroli Siber

Dalam rangka meningkatkan pengawasan peredaran Obat dan Makanan di media daring, Badan POM telah melakukan kegiatan patroli siber untuk melakukan pemantauan dan pelaporan terhadap penjualan produk obat dan makanan ilegal dan/atau tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan data hasil patroli siber Obat dan Makanan sampai dengan triwulan IV tahun 2022, ditemukan sebanyak 439.615 *link* yang teridentifikasi menjual Obat dan Makanan ilegal dan/atau tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.



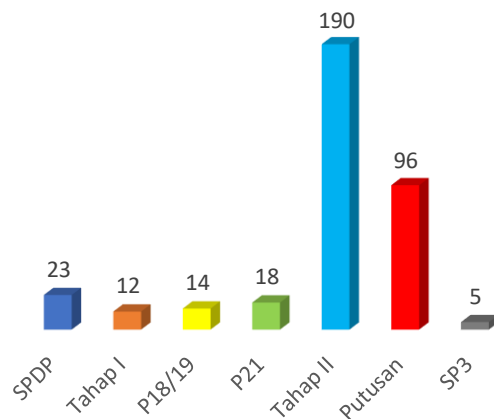
Gambar 10. Hasil Patroli Siber Obat dan Makanan s.d Triwulan IV 2022

4. Hasil Penyidikan Obat dan Makanan

Dalam rangka memberantas dan menertibkan peredaran produk Obat dan Makanan ilegal termasuk palsu serta obat keras di sarana yang tidak berwenang, Badan POM secara terus menerus melakukan investigasi awal dan penyidikan kasus tindak pidana di bidang Obat dan Makanan. Upaya ini dilakukan secara mandiri maupun bersinergi dengan instansi penegak hukum lainnya (dalam kerangka Operasi Gabungan Nasional dan Operasi Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal).

Sampai dengan triwulan IV tahun 2022, PPNS Badan

POM telah menindaklanjuti 262 perkara dengan pro Justitia. Sebanyak 23 perkara masih dalam tahap SPDP, 12 perkara pada tahap I, 14 perkara pada tahap P18/19, 18 perkara pada tahap P21, 190 perkara pada tahap II dan diantara perkara tahap II tersebut sebanyak 96 perkara sudah mendapatkan putusan pengadilan, dan 5 perkara diterbitkan SP3.



III. Penyusunan Standar/Regulasi/Pedoman

Dalam rangka mengawal mutu Obat dan Makanan, telah disusun standar/regulasi/pedoman di bidang Obat dan Makanan.



Obat

Pada tahun 2022 terdapat 10 peraturan/standar/pedoman obat yang telah selesai proses penyusunan. Daftar 10 peraturan/standar/pedoman obat yang telah selesai proses penyusunannya selama tahun 2022 sebagai berikut:

1. Standar Obat Non Kompendial (100%).
2. Standar Mutu Produk Biologi dan Produk Radiofarmaka (100%).
3. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Pedoman Pelulusan Bets/Lot Release Vaksin dan Produk Darah (100%).
4. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Risiko Keberadaan Nitrosamin dalam Obat dan Bahan Obat (100%).
5. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Pedoman Penilaian Produk Inhaler dan Nasal (100%).
6. Rancangan Keputusan Kepala Badan POM tentang Penetapan Informatarium Obat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Indonesia Edisi 4 (100%).
7. Rancangan Keputusan Kepala Badan POM tentang Obat Generik Tertentu Wajib Uji Bioekivalensi (100%).
8. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Pemasukan Obat dan Bahan Obat Melalui Jalur Khusus (*Special Access Scheme*) (100%).
9. Keputusan Kepala Badan POM tentang Pedoman Pengawasan Produk Tembakau (100%).
10. Keputusan Kepala Badan POM tentang Pedoman Teknis Pengawasan Obat dan Bahan Obat di Fasilitas Produksi, Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian (100%).



Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Terdapat 11 peraturan/standar/pedoman obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang telah selesai disusun pada tahun 2022. Daftar 11 peraturan/standar/pedoman tersebut sebagai berikut:

1. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerapan Aspek CPOTB secara Bertahap (100%).
2. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Perubahan atas Peraturan Badan POM Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Uji Farmakodinamik Praklinik Obat Tradisional (Lampiran) (100%).

3. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Pengawasan Produksi dan Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan (100%).
4. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Perubahan atas Peraturan Badan POM Nomor 17 Tahun 2019 tentang Persyaratan Mutu Suplemen Kesehatan (100%).
5. Pedoman Uji Klinik Suplemen Kesehatan (100%).
6. Rancangan Revisi Peraturan Badan POM Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Mekanisme Monitoring Efek Samping Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan (100%).
7. Rancangan Revisi Peraturan Badan POM Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika (100%).
8. Rancangan Perubahan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Dokumen Informasi Produk (100%).
9. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Parfum Isi Ulang (100%).
10. Rancangan Keputusan Kepala Badan POM tentang Pencabutan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.20.428 Tahun 2020 tentang Penetapan Bentuk Sediaan Kosmetika (100%).
11. Rancangan Keputusan Kepala Badan POM tentang Pencabutan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.20.428 Tahun 2020 tentang Penetapan Bentuk Sediaan Kosmetika (100%).

Target jumlah kajian obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2022 sebanyak 130 kajian. Pada awal triwulan IV terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp150.000.000,- sehingga dilakukan penyesuaian target kajian dari semula 130 kajian menjadi 100 kajian, yang terdiri atas 40 kajian di bidang obat tradisional, 45 kajian di bidang suplemen kesehatan dan 15 kajian di bidang kosmetik. Sampai dengan Triwulan IV ini telah diselesaikan 144 kajian yang terdiri dari 44 kajian di bidang obat tradisional, 79 kajian di bidang suplemen kesehatan dan 21 kajian di bidang kosmetik. Dari 144 kajian yang telah diselesaikan tersebut, sebanyak 143 kajian telah diselesaikan tepat waktu (tidak lebih dari 85 Hari Kerja). Penyusunan kajian dilakukan berdasarkan permintaan dari stakeholder.



Pangan

Terdapat 11 peraturan/standar/pedoman pangan olahan yang disusun dalam tahun 2022. Daftar 11 peraturan/standar/pedoman beserta progres penyusunan sampai dengan triwulan IV sebagai berikut: Penyusunan

1. Penyusunan Revisi Peraturan Badan POM Nomor 20 Tahun 2019 (Lampiran III - V) (100%).
2. Penyusunan Code of Practices untuk mereduksi 3-monochloropropane-1,2- diol esters (3-MCPDE) dan glycidyl esters (GE) dalam Minyak Goreng Sawit (40%).
3. Penyusunan Pedoman Mitigasi Risiko Senyawa Etilen Oksida, 2,6-diisopropylnaphtalene dan 9,10-Antrakuinon dalam Pangan Olahan (100%).
4. Penyusunan Pedoman Pengkajian Bahan Tambahan Pangan (95%).
5. Pedoman Mitigasi Risiko Cemaran Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) pada Pangan Olahan (100%).
6. Penyusunan Revisi Peraturan Badan POM No. 34 Tahun 2019 tentang Kategori Pangan (100%).
7. Penyusunan Rancangan Perubahan Kedua Peraturan Badan POM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan (100%).
8. Penyusunan Pedoman Iklan Pangan Olahan (100%).
9. Penyusunan Revisi Peraturan Kepala Badan POM No. 9 Tahun 2016 tentang Acuan Label Gizi (100%).
10. Penyusunan Revisi Peraturan BPOM No. 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pangan Produk Rekayasa Genetik (Pangan Siap Saji Terkemas) (100%).
11. Rancangan Keputusan Kepala Badan POM tentang Jenis Mikroorganisme yang Digunakan pada Pangan Olahan (100%).

Badan POM juga menyusun kajian terkait pangan olahan. Sampai dengan triwulan IV telah diselesaikan 213 kajian. Dari 213 kajian tersebut terdapat 3 kajian yang tidak diselesaikan tepat waktu. Penyusunan kajian dilakukan berdasarkan permintaan dari stakeholder.

IV. Riset dan Kajian di Bidang Obat dan Makanan

Riset dan Kajian Obat dan Makanan dilakukan untuk mendukung pengambilan keputusan sekaligus dasar penyusunan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan, selain itu data hasil riset dan kajian yang berupa informasi dan rekomendasi juga dimanfaatkan untuk mengetahui dan meningkatkan efektifitas implementasi kebijakan pengawasan Obat dan Makanan. Terdapat 11 topik riset dan kajian prioritas yang dilaksanakan BPOM pada tahun 2022 sebagai berikut:

1. Analisis Data Pengawasan Obat dan Makanan dalam Rangka Mendukung Pengendalian Resistensi Antimikroba di Lingkungan Badan POM Tahun 2022 (100%).
2. Analisis Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan Mendukung Usaha Mikro Kecil (UMK) Obat Tradisional menggunakan pemodelan System Dynamic (100%).
3. Analisis Risiko Keamanan Pangan Indonesia Risk Assessment Center (INARAC) (100%).
4. Survei Profil Produk Obat dan Makanan Beredar (100%).
5. Pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu dan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2022 (100%).
6. Pengukuran Indeks Kepatuhan (Compliance Index) Pelaku Usaha di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2022 (100%).
7. Analisis Data Kasus Keracunan Obat dan Makanan (100%).
8. Pengukuran Indeks Kepuasan Pelaku Usaha (IKEPU) Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan BPOM Tahun 2022 (100%).
9. Evaluasi Penerapan 2D Barcode dalam Program Pengawasan Obat dan Makanan (100%).
10. Kajian Polutan Farmasi Pada Air Baku Untuk Minum dan Produksi Obat dan Makanan Tahun 2022 (100%).
11. Analisis Senyawa Karsinogenik pada Produk Pangan Olahan dan Kemasan Pangan (100%).

V. Pengembangan dan Pengujian Obat dan Makanan

1. Metode Analisis (MA) yang dikembangkan

Badan POM terus mengembangkan metode analisis (MA) Obat dan Makanan agar dapat melakukan pengujian keamanan dan mutu Obat dan Makanan yang beredar. Pengembangan metode analisis (MA) dilakukan untuk komoditi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, produk biologi, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan, air, mikrobiologi dan biologi molekuler. Hasil pengujian digunakan untuk membuat kebijakan bahkan penindakan terkait pelanggaran di bidang obat dan makanan.

Pada tahun 2022, Badan POM menargetkan pengembangan 200 MA. Sampai dengan triwulan IV tahun 2022 telah dikembangkan 213 judul MA, sehingga % capaian terhadap target 2022 sebesar 106,5%.

2. Baku Pembanding yang dikembangkan

Pengembangan Baku Pembanding (BP) dapat dimanfaatkan oleh Balai Besar/ Balai POM untuk memperkuat pengawasan Obat dan Makanan melalui pengujian laboratorium. Sampai dengan triwulan IV 2022 telah dikembangkan 126 baku pembanding.

3. Sampel yang ditindaklanjuti tepat waktu

Badan POM selalu berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholder melalui pelayanan pengujian Obat dan Makanan termasuk sampel pengujian produk biologi dan sampel lot release vaksin dalam rangka pengawasan keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat, yaitu dengan pemenuhan timeline pengujian sampel Obat dan Makanan.

Sampai dengan triwulan IV tahun 2022, terdapat 3.023 sampel yang telah selesai diuji di laboratorium PPPOMN. Sebanyak 2.983 sampel telah selesai uji dan memenuhi ketentuan timeline, sehingga persentase sampel yang ditindaklanjuti tepat waktu sebesar 98,67%

4. Alat Pengujian Laboratorium Badan POM yang dikalibrasi sesuai Standar

Untuk menjamin validitas pengujian Obat dan Makanan di laboratorium diperlukan alat yang sudah terkalibrasi sesuai standar. Pada tahun 2024 target jumlah alat yang dapat dikalibrasi BPOM adalah 3.154 alat. Sampai dengan triwulan IV tahun 2022, telah dilakukan kalibrasi terhadap 3.172 peralatan laboratorium, sehingga persentase capaiannya sebesar 100,57%.

5. Jejaring Pengujian Obat dan Makanan yang Berpartisipasi Aktif

Kegiatan jejaring laboratorium pengujian Obat dan Makanan merupakan kegiatan dalam rangka peningkatan kompetensi dan kapabilitas laboratorium uji, sharing informasi dan teknologi terkini yang sesuai dengan target dari jejaring tersebut. Kegiatan dapat berupa pertemuan, uji profisiensi, kolaborasi, pelatihan, workshop, FGD yang diikuti oleh laboratorium di lingkungan BPOM dan laboratorium non-BPOM sesuai lingkup pengujian/ keahlian.

Pada tahun 2022, Badan POM menargetkan partisipasi dalam 10 jejaring laboratorium. Sampai dengan triwulan IV tahun 2022, Badan POM telah berpartisipasi dalam 10 jejaring yaitu Jejaring ASEAN Pharmaceutical Testing Laboratory Committee (APTLC), ASEAN Cosmetic Testing Laboratory Committee (ACTLC), ASEAN Food Reference Laboratory (AFRL) for Food Additives, LRPPI pengujian Bahan Tambang Pangan dalam Pangan Olahan, LRPPI pengujian Mikotoksin dalam Pangan Olahan, LRPPI Pengujian Cemarkan Logam dan Mineral

dalam Pangan Olahan, LRPPI Pengujian Bahan Kontak Pangan, LRPPI pengujian Mikrobiologi dalam Pangan Olahan, LRPPI pengujian GMO dan DNA spesifik spesies dalam Pangan Olahan dan Jejaring Laboratorium Kosmetik Indonesia (JLKI).

6. Pemenuhan *Grand Design* Penguatan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan

Dalam rangka memperkuat laboratorium dibutuhkan panduan untuk mengarahkan rencana penguatan laboratorium BPOM di masa depan secara terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan, apa yang harus dikembangkan dan strategi yang harus dilakukan serta target setiap tahunnya. Untuk itu perlu dibuat *grand design* penguatan laboratorium pengawasan Obat dan Makanan. *Grand design* disusun dengan memuat strategi penguatan, program prioritas dan indikator penguatan laboratorium sejalan dengan tujuan, sasaran dan arah kebijakan BPOM.

Sampai dengan tahun 2022, kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pemenuhan *grand design* adalah penyusunan tim dan pedoman terkait *Green Laboratory* dan *Digital Laboratory*, *monitoring* dan evaluasi serta pendampingan dalam implementasi regionalisasi laboratorium, pembinaan Balai Besar/Balai POM dalam rangka Percepatan Pemenuhan SKL, serta pengembangan laboratorium Balai POM di Tarakan. Dengan terlaksananya seluruh kegiatan tersebut, maka pemenuhan *grand design* penguatan laboratorium pengawasan Obat dan Makanan sudah mencapai 20%.

7. Pengujian Sampel Spesimen Covid-19

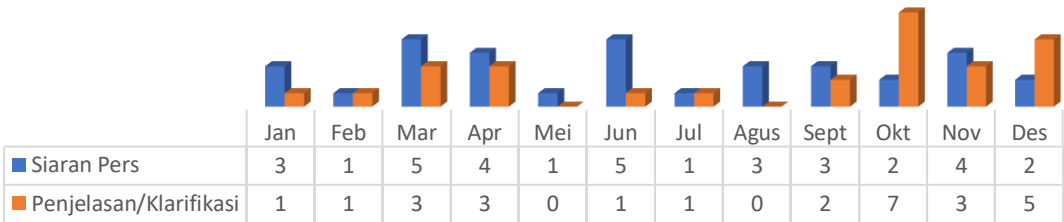
Di masa pandemi, Badan POM berkontribusi dalam pengujian sampel spesimen Covid-19 yang dilakukan di Laboratorium Biohazard.

Pada tahun 2022, laboratorium biohazard Badan POM bergabung dalam jejaring pengujian Whole Genome Sequencing (WGS), di mana pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui penyebaran mutasi virus Covid-19. Sampai dengan 30 Desember 2022 jumlah sampel yang diuji WGS sebanyak 4.685 sampel dengan sebagian besar sampel merupakan varian Omicron.



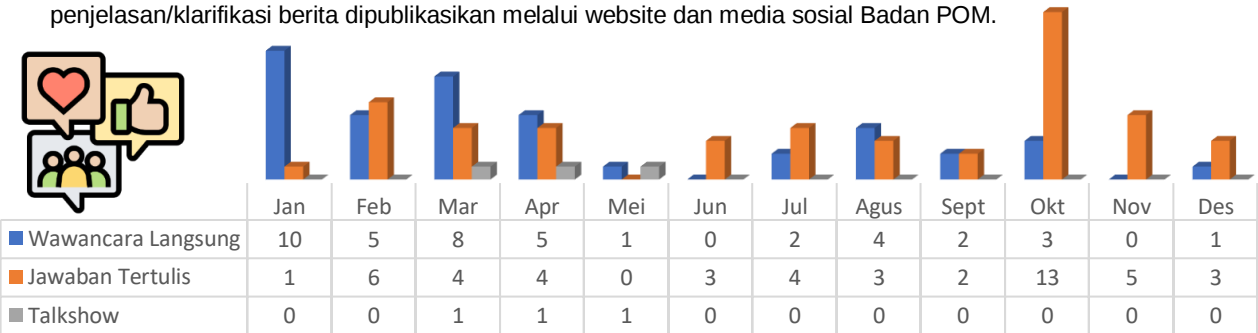
VI. Optimalisasi Pemberdayaan Mitra Kerja dan Masyarakat

Sepanjang tahun 2022, Badan POM telah menerbitkan 34 siaran pers dan 27 penjelasan/klarifikasi Badan POM terkait isu Obat dan Makanan. Penerbitan siaran pers paling banyak terjadi di bulan Maret dan Juni yaitu sebanyak 5 siaran pers, sedangkan penjelasan/klarifikasi paling banyak dipublikasikan di bulan Oktober yaitu 7 klarifikasi.



Gambar 12. Data Penerbitan Siaran Pers dan Penjelasan/Klarifikasi

Pembahasan isu bervariasi dari berbagai komoditas, antara lain obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan, dan umum/kinerja. Topik siaran pers dan penjelasan/klarifikasi yang paling mendominasi sampai dengan triwulan 4 berkaitan dengan komoditas obat dan NAPPZA (20 siaran pers dan 17 penjelasan/klarifikasi). Sepanjang tahun 2022, topik yang paling sering dibahas yaitu terkait kandungan Etilen Glikol (EG)/Dietilen Glikol (DEG) dalam sirup obat dan rilis EUA Vaksin Covid-19. Seluruh siaran pers dan penjelasan/klarifikasi berita dipublikasikan melalui website dan media sosial Badan POM.



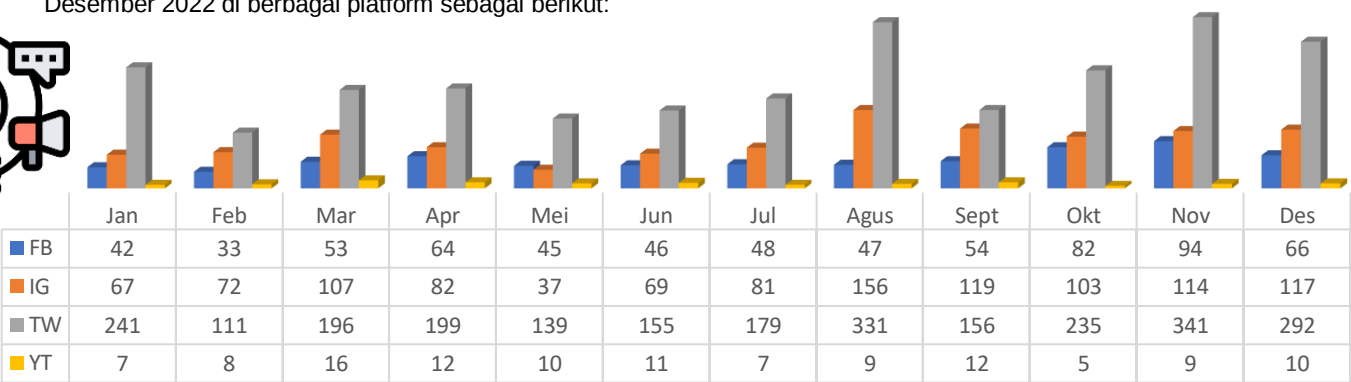
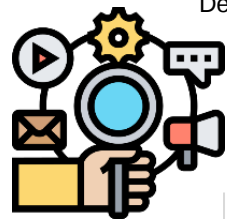
Gambar 13. Realisasi Kegiatan Pelayanan Informasi kepada Media

Sepanjang tahun 2022, Badan POM melakukan kegiatan pelayanan informasi kepada media berupa wawancara/talkshow serta pemberian jawaban tertulis. Dengan rincian kegiatan pelayanan informasi yang

dilakukan adalah 41 wawancara langsung, 48 jawaban tertulis dan 3 pemenuhan narasumber untuk program talkshow.

Badan POM juga secara aktif menyampaikan informasi seputar kegiatan strategis yang dilakukan Badan POM melalui berita aktual yang diunggah melalui website resmi Badan POM dan disebarakan kepada media massa. Tercatat sebanyak 156 berita aktual telah dipublikasikan, yang merupakan hasil peliputan kegiatan Badan POM sepanjang tahun 2022.

Pada triwulan IV tahun 2022, aktivitas media sosial Badan POM pada 4 platform media sosial yaitu Facebook, Instagram, Twitter, dan Youtube memiliki rata-rata 3-4 unggahan per hari. Platform Twitter adalah platform yang memiliki aktivitas tertinggi sebanyak 868 tweets dibandingkan dengan 3 platform media sosial lainnya. Aktivitas tertinggi kedua adalah Instagram dengan 334 unggahan, menyusul Facebook sebanyak 242 unggahan, serta Youtube sebanyak 24 unggahan. Sedangkan total unggahan media sosial selama periode Januari sampai dengan Desember 2022 di berbagai platform sebagai berikut:

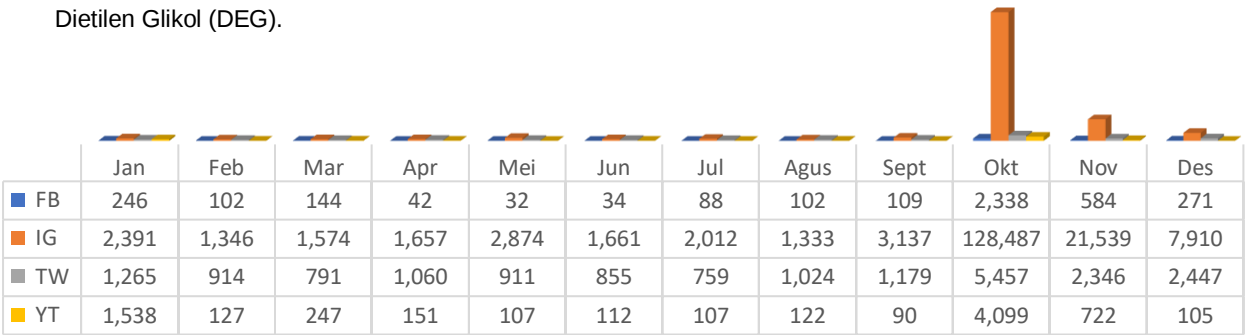


Gambar 14. Total Unggahan Media Sosial BPOM Berdasarkan Platform

Secara garis besar, total unggahan periode Januari sampai dengan Desember 2022 di berbagai platform adalah 4.489 konten. Rincian jumlah unggahan per bulannya adalah 357 unggahan di bulan Januari, 224 unggahan di bulan Februari, 372 unggahan di bulan Maret, 357 unggahan di bulan April, 231 unggahan di bulan Mei, 281 unggahan di bulan Juni, 315 unggahan di bulan Juli, 543 unggahan di bulan Agustus, 341 unggahan di bulan September, 425 unggahan di bulan Oktober, 558 unggahan di bulan November dan 485 unggahan di bulan Desember.

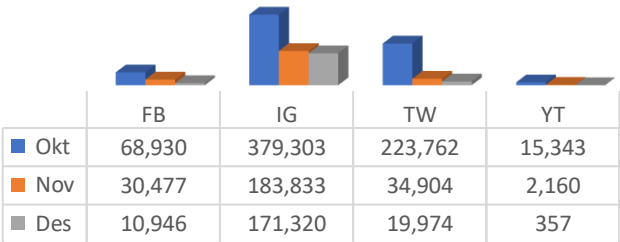
Sementara itu, pertumbuhan audiens/khalayak/pengunjung terhadap 4 platform media sosial terpantau stabil. Instagram merupakan platform dengan total audiens/khalayak/pengunjung tertinggi pada triwulan IV dengan jumlah

audiens/khalayak/pengunjung sebanyak 157.396 audiens, sementara di peringkat kedua ada *platform Twitter* dengan jumlah 10.529 audiens, dilanjutkan dengan *Youtube* dengan jumlah 4.926 audiens dan *Facebook* dengan 3.193 audiens. Pertumbuhan audiens tertinggi terjadi pada Oktober, yaitu sebesar 140.381 audiens, disusul November 25.191 audiens dan Desember 10.733 audiens. Pertumbuhan audiens yang sangat pesat pada periode Oktober – Desember 2022 dipengaruhi adanya kasus sirup obat yang mengandung cemaran Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG).



Gambar 15. Pertumbuhan Audiens per Platform Tahun 2022

Pada triwulan IV, engagement pada setiap platform cenderung menurun. Engagement tertinggi terjadi pada bulan Oktober 2022 dengan jumlah 687.338, diikuti bulan November 2022 sebesar 251.374, dan Desember 2022 sebesar 202.597. Pertumbuhan jumlah engagement terlihat menurun di 4 platform tersebut, seperti terlihat pada grafik berikut:



Gambar 16. Grafik engagement Media Sosial pada Triwulan IV 2022

Tingginya *engagement* pada bulan Oktober 2022 karena adanya konten isu konten kematian anak di Gambia terkait kandungan cemaran EG/DEG pada sirup obat. Sedangkan menurunnya *engagement* selama Oktober sampai Desember 2022 kemungkinan disebabkan karena menurunnya perhatian dari *audiens* seiring terbitnya konten

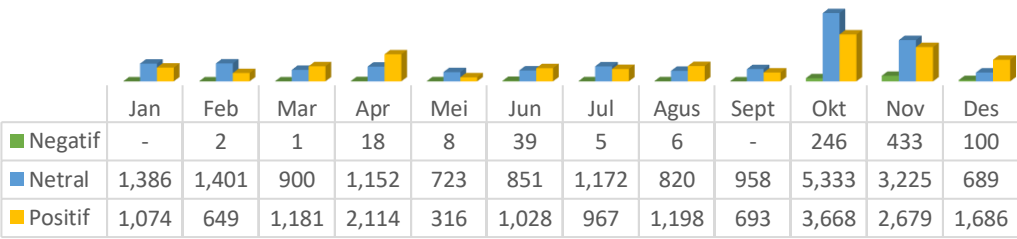
penjelasan Badan POM terkait perkembangan hasil pengawasan sirup obat yang aman digunakan, baik berdasarkan data registrasi Badan POM, maupun berdasarkan verifikasi mandiri dari Industri Farmasi (IF) pada bulan tersebut.

Top engagement content terkait Badan POM pada keempat platform dapat dilihat pada gambar berikut :



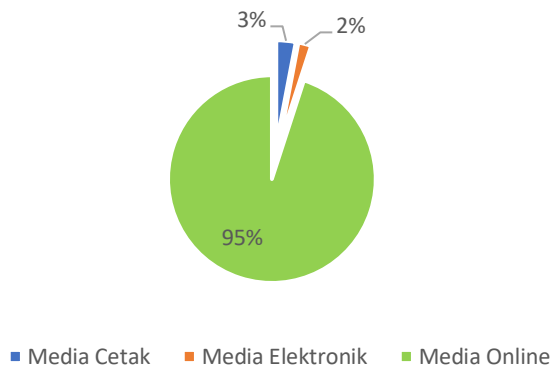
Gambar 17. Top engagement content terkait Badan POM pada platform Facebook, Twitter, Instagram dan Youtube pada Triwulan IV 2022

Pemberitaan terkait Obat dan Makanan dan Badan POM sampai dengan akhir tahun 2022 terdiri dari 36.721 pemberitaan. Dari jumlah tersebut, berita bertonasi netral sebanyak 18.610 pemberitaan dan berita bertonasi positif sebanyak 17.253 pemberitaan serta berita bertonasi negatif sebanyak 858 pemberitaan. Tonasi berita positif muncul dari berbagai kegiatan Badan POM serta banyaknya pernyataan Badan POM dalam sebuah isu yang dikutip media, sedangkan tonasi netral muncul dari pemberitaan dengan topik obat dan makanan yang tidak mengutip Badan POM.



Gambar 18. Tren Tonasi Pemberitaan

Tingginya pemberitaan positif dan netral pada Oktober 2022 karena adanya isu sirup obat yang mendapatkan perhatian publik. Pada November 2022, pemberitaan positif dan netral melandai dibanding Oktober 2022, namun terdapat peningkatan pemberitaan negative karena munculnya berbagai pihak yang mengkritik BPOM.



Berdasarkan jenis media, media yang memberitakan terkait Obat dan Makanan lebih banyak terdapat di media online (95%), sedangkan media cetak sebanyak 3% dan media elektronik 2%.

Gambar 19. Diagram Sebaran Pemberitaan Badan POM di Media Sampai Dengan Triwulan IV 2022

Pada tahun 2022 terdapat berbagai topik pemberitaan yang terkait dengan Badan POM. Topik pemberitaan di bulan Januari dan Februari didominasi oleh vaksin Covid-19. Selanjutnya pada bulan Maret, Badan POM mengangkat isu penemuan produk kopi dan jamu Berbahan Kimia Obat (BKO). Pada bulan April pemberitaan didominasi oleh topik mengenai intensifikasi pengawasan yang dilakukan selama bulan Ramadhan. Sedangkan isu mengenai pelabelan BPA free mendominasi pemberitaan pada Mei dan Juni. Topik terkait vaksin dan obat Covid-19 yang memperoleh EUA dari Badan POM kembali dan topik pemberitaan terkait respon BPOM terkait berbagai penarikan produk di luar negeri. Topik sirup obat mendominasi pemberitaan di media pada bulan Oktober dan November 2022. Pemberitaan mencakup berbagai tindakan yang dilakukan BPOM dalam merespon isu tersebut, serta tanggapan pihak lain terhadap pengawasan BPOM.



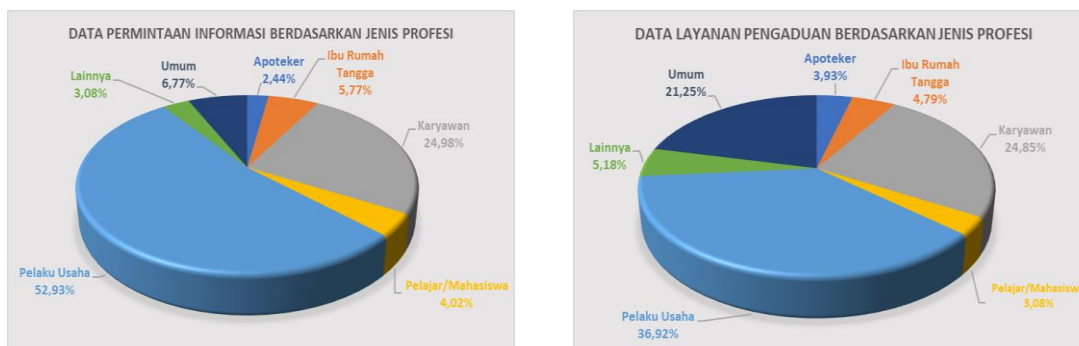


Gambar 20. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan Triwulan IV Tahun 2022

Keterangan: *KIE oleh Biro Hukum dan Organisasi

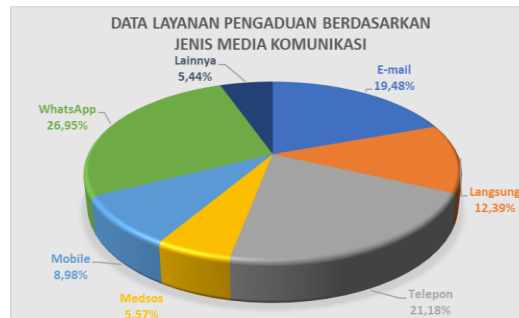
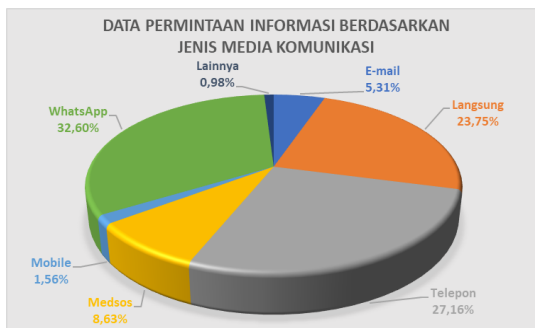
Sampai dengan triwulan IV tahun 2022, terdapat 59 permintaan informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) namun 4 permintaan tidak dapat ditindaklanjuti karena persyaratan tidak lengkap. Topik permintaan informasi tersebut mengenai peraturan terkait Obat dan Makanan, vaksin Covid-19, nomor izin edar, data obat palsu, sarana produksi dan sarana distribusi Obat dan Makanan, dan penarikan obat ilegal. Dari 55 permintaan informasi yang ditindaklanjuti oleh Badan POM, 37 permintaan informasi dikabulkan sepenuhnya (67%), 13 permintaan informasi yang dikabulkan Sebagian (24%), dan 5 permintaan informasi yang ditolak (9%) dengan alasan ada sebagian informasi yang termasuk dalam Informasi yang Dikecualikan dan merupakan wewenang instansi lain). Seluruh permintaan informasi dapat diselesaikan sesuai jangka waktu penyelesaian (tidak lebih dari 17 hari kerja).

Berdasarkan data layanan informasi dan pengaduan masyarakat periode Januari – Desember tahun 2022, Badan POM telah melaksanakan layanan informasi dan pengaduan masyarakat melalui ULPK Pusat dan 73 Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia serta Contact Center HALOBPOM sebanyak 55.367 layanan, terdiri dari 53.842 (97,25%) layanan permintaan informasi dan 1.525 (2,75%) layanan pengaduan.



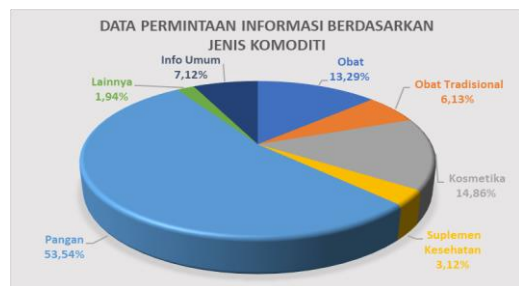
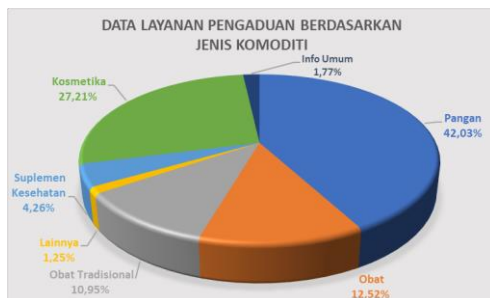
Gambar 21. Profil Pengguna Layanan Informasi dan Pengaduan Badan POM Berdasarkan Profesi

Profil profesi masyarakat yang mengakses layanan **informasi** sebagian besar berasal dari pelaku usaha sebanyak 28.501 (52,93%) layanan dan karyawan sebanyak 13.452 (24,98%) layanan. Adapun **pengaduan** sebagian besar dari pelaku usaha sebanyak 563 (36,92%) layanan dan karyawan sebanyak 379 (24,85%) layanan.



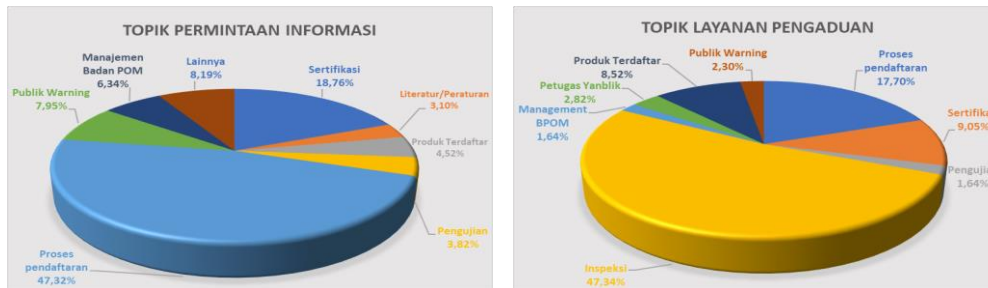
Gambar 22. Profil Pengguna Layanan Informasi dan Pengaduan Badan POM Berdasarkan Jenis Media

Media komunikasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat dalam mengakses layanan informasi yaitu melalui aplikasi WhatsApp sebanyak 17.555 (32,60%) layanan dan telepon sebanyak 14.622 (27,16%) layanan. Adapun media yang paling banyak digunakan masyarakat dalam menyampaikan pengaduan yaitu melalui aplikasi WhatsApp sebanyak 411 (26,95%) layanan dan telepon sebanyak 323 (21,18%) layanan.



Gambar 23. Profil Layanan Informasi dan Pengaduan yang Diberikan oleh Badan POM Berdasarkan Komoditi

Berdasarkan komoditi, informasi yang banyak ditanyakan masyarakat yaitu terkait pangan sebanyak 28.829 (53,54%) layanan dan kosmetika sebanyak 8.003 (14,86%) layanan. Adapun komoditi yang banyak **diadukan** yaitu pangan sebanyak 641 (42,03%) layanan dan kosmetika sebanyak 415 (27,21%) layanan.



Gambar 24. Topik Layanan Informasi dan Pengaduan yang Diberikan atau Ditanyakan kepada Badan POM

Topik informasi yang paling banyak ditanyakan oleh masyarakat yaitu terkait proses pendaftaran sebanyak 25.477 (47,32%) layanan dan proses sertifikasi sebanyak 10.101 (18,76%) layanan. Topik lain yang sering ditanyakan antara lain informasi tentang Isu Obat Sirup yang Berisiko Mengandung Cemarkan Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG), informasi magang/penelitian, informasi nomor kontak dan alamat unit di Badan POM, produk terdaftar/legalitas produk, pengujian laboratorium, peraturan terkait pengawasan Obat dan Makanan, indikasi/khasiat, label halal, bahan tambahan pangan, dan tanggal kedaluwarsa. Adapun topik pengaduan yang banyak diajukan yaitu tentang inspeksi seperti pengaduan terhadap produk Obat dan Makanan ilegal ataupun tidak sesuai ketentuan sebanyak 722 (47,34%) layanan dan keluhan terkait proses pendaftaran sebanyak 270 (17,70%) layanan.

VII. Digitalisasi Pelayanan Publik

1. Implementasi Tanda Tangan Elektronik

Badan POM yang bekerjasama dengan BSrE (Balai Sertifikasi Elektronik) telah mengimplementasikan Tanda Tangan Elektronik (TTE) sejak 2018. TTE di Badan POM telah diimplementasikan terhadap 12 Aplikasi baik layanan publik (dokumen perizinan) dan layanan internal (tata naskah dinas BPOM).

Pada triwulan IV, untuk menunjang simplifikasi penerbitan Surat Keterangan Ekspor (SKE) terhadap komoditi Obat dan Makanan pada Balai Besar/Balai POM di seluruh wilayah Indonesia dan penyeragaman format pada SKE untuk Unit Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis telah diberlakukan implementasi tanda tangan elektronik secara penuh pada penerbitan SKE. Hal tersebut diharapkan dapat membantu agar waktu layanan Sesuai dengan Service Level Agreement (SLA).

2. Sistem Pengawasan Obat dan Makanan Berbasis Digital (2D Barcode)

a. Implementasi 2D Barcode

Dengan ditetapkan payung hukum Peraturan BPOM No 22 Tahun 2022 tentang Implementasi 2D Barcode maka beberapa yang dilakukan perubahan diantaranya:

- Penyesuaian isian 2D Barcode dan Implementasi 2D Barcode



Gambar 25. Penyesuaian isian 2D Barcode dan Implementasi 2D Barcode

- Penyesuaian regulasi terbaru pada laman Track and Trace Anti Counterfeit (TTAC) yang bertujuan agar dapat mendiseminasikan informasi regulasi terupdate dari implementasi 2D Barcode
- Dukungan Percepatan Implementasi 2D Barcode

Pengawasan obat dan makanan berbasis digital merupakan salah satu cara dalam meminimalisir pemalsuan obat dan makanan. Dalam pelaksanaannya, diperlukan pendampingan kepada pelaku usaha serta sosialisasi kepada masyarakat.

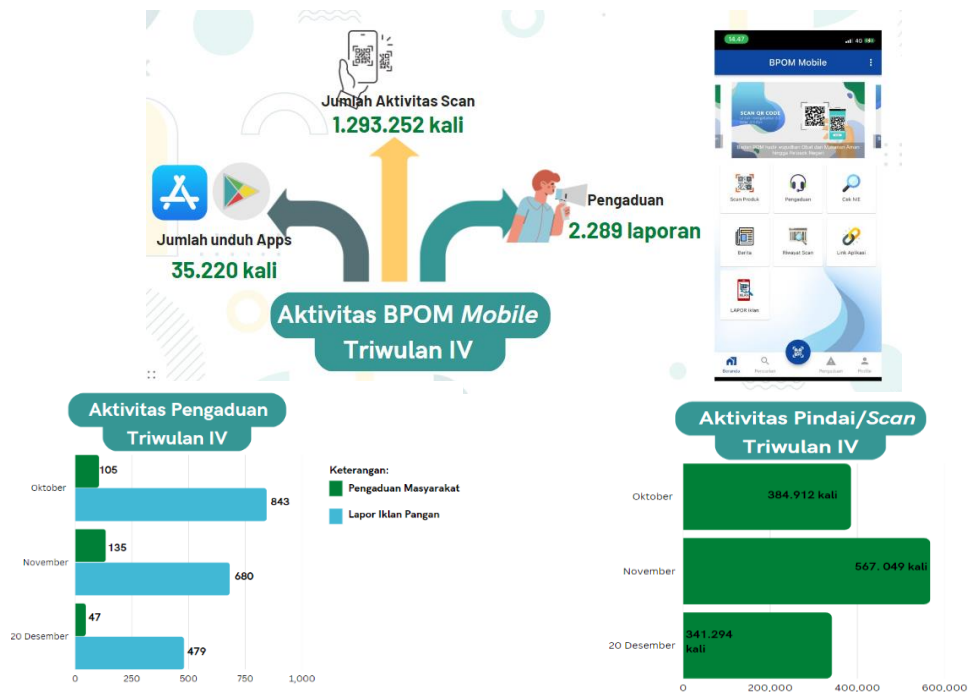
Strategi pendampingan pelaku usaha yang dilakukan oleh Badan POM, antara lain dengan melakukan desk konsultasi baik secara tatap muka, maupun dengan *helpdesk* teknis dan substansi melalui *email* dan *Whatsapp*. Pelaksanaan desk konsultasi yang telah dilakukan pada triwulan IV terlampir pada gambar berikut.



Gambar 26. Aktivitas dalam Percepatan Implementasi 2D Barcode

b. BPOM Mobile

Pencantuman 2D Barcode pada kemasan produk Obat dan Makanan memberikan kesempatan partisipatif seluas-luasnya bagi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dengan melakukan pemindaian (scan) 2D barcode menggunakan aplikasi BPOM Mobile, masyarakat dapat memverifikasi keaslian dan legalitas produk. Aplikasi BPOM Mobile dilengkapi menu lainnya yaitu cek NIE produk, pengaduan dan update berita Klarifikasi BPOM. Masyarakat dengan mudah dapat melaporkan temuan produk ataupun pengaduan obat dan makanan dimanapun beradar tanpa harus mendatangi kantor Badan POM. Selain itu, BPOM Mobile wadah mencegah hoax dengan update berita ataupun klarifikasi seputar Obat dan Makanan.



Gambar 27. Aktivitas pada BPOM Mobile

3. Sistem Informasi Pelaporan Terpadu

Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) merupakan aplikasi yang digunakan sebagai media pelaporan hasil pengawasan dari Balai Besar / Balai dan Loka POM ke Pusat secara elektronik sejak tahun 2012. Sistem ini mengalami pengembangan dan penyempurnaan setiap tahunnya mengikuti perkembangan pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM.

Selama tahun 2022 ini telah dilakukan beberapa pengembangan dan pemeliharaan SIPT yang terlampir pada gambar berikut



Gambar 28. Tampilan Sistem Informasi Pelaporan Terpadu 2022

4. Implementasi Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko

Integrasi Layanan Publik dengan OSS RBA menjadi tuntutan dalam rangka percepatan berusaha. Percepatan Implementasi OSS terus dilakukan secara bertahap dengan terus berupaya agar aplikasi layanan publik Badan POM dapat terintegrasi secara *Live*.

Jumlah Pelayanan Publik yang termasuk Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) milik Badan POM yang harus terintegrasi dengan Layanan Sistem OSS RBA berjumlah 75 perizinan, dimana terdiri dari 66 PB UMKU melalui integrasi dan 9 PB UMKU melalui skema hak akses.

Badan POM menjadi top 8 (delapan) besar Kementerian Negara/ Lembaga yang berkinerja baik dalam penyelenggaraan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Kementerian Negara/Lembaga dengan total izin yang diterbitkan yaitu sebanyak 284.072.

Implementasi integrasi OSS RBA dengan aplikasi layanan publik di Badan POM sampai dengan TW 4, yaitu:

a. Integrasi Secara Penuh (Pengajuan dan Penerbitan melalui OSS RBA).

- 1) Aplikasi e-Sertifikasi, dengan PB UMKU terdiri dari Sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik, Persetujuan Penggunaan Fasilitas Pembuatan Obat, Sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik, Sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Secara Bertahap, Perubahan Fasilitas Produksi Obat Tradisional, Sertifikat Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik, Persetujuan Denah Bangunan Industri Kosmetika, Penilaian Pemenuhan Persyaratan CPOB terhadap Fasilitas Pembuatan Obat Impor, Persetujuan Penggunaan Fasilitas Produksi Obat Bersama dengan Non-Obat, Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik, Sertifikat Pemenuhan Komitmen Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredaran, Sertifikat Pemenuhan Standar Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredaran
- 2) Aplikasi SPP-IRT: Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).
- 3) Aplikasi Sertifikasi CDOB: Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik, Perubahan Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik.
- 4) Aplikasi SIREKA: Persetujuan Iklan Obat Tradisional, Persetujuan Iklan Obat Kuasi, Persetujuan Iklan Suplemen Kesehatan.
- 5) Aplikasi e-Reg RBA: Izin Edar Pangan Olahan, Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan, Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan Wajib SNI dan Izin Edar Pangan Olahan dengan Notifikasi
- 6) Skema Hak Akses: Surat Persetujuan Penggunaan Fasilitas Produksi Kosmetika Bersama dengan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetika Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB Secara Bertahap Golongan A, Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB Golongan B, Sertifikat CPKB Perubahan Teknis, Persetujuan Memproduksi Suplemen Kesehatan di Fasilitas Pangan, Persetujuan Penggunaan Fasilitas Produksi dan/atau Pengujian Obat Tradisional Bersama dengan Obat Kuasi, Kosmetika dan Pangan Olahan, Rekomendasi Importir Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dan Rekomendasi badan usaha di bidang pemasaran suplemen Kesehatan sebagai pemilik atau pemegang izin edar yang melakukan kontrak produksi dengan industri yang memiliki sertifikat Cara Pembuatan yang Baik yang berada di wilayah Indonesia.

b. Siap Implementasi Integrasi secara penuh

- 1) Aplikasi ASROT: Izin Edar Obat Tradisional, Hasil Pra Registrasi Obat Tradisional, Izin Edar Registrasi Ulang Obat Tradisional, Izin Edar Suplemen Kesehatan, Hasil Pra Registrasi Suplemen Kesehatan, Izin Edar Registrasi Ulang Suplemen Kesehatan, Izin Edar Obat Kuasi, Izin Edar Registrasi Ulang Obat Kuasi, Hasil Pra Registrasi Obat Kuasi.
- 2) Aplikasi New Aero: Izin Edar Obat, Hasil Pra Registrasi Obat, Persetujuan Penggunaan Obat dalam Kondisi Darurat (Emergency Use Authorization) dan Persetujuan Pelaksanaan Uji Bioekivalensi.
- 3) Aplikasi Notifkos: Izin Edar Kosmetika, Pembaharuan Notifikasi Kosmetika, Sertifikat/Surat Standar Notifikasi Perubahan/Variasi Kemasan dan Sertifikat/Surat Standar Notifikasi Kosmetika Kit
- 4) Aplikasi SIAPIK: Persetujuan Iklan Obat.
- 5) Aplikasi PMR: Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Keamanan Pangan di Industri Pangan.
- 6) Aplikasi e-Standar Pangan: Izin Pengkajian Keamanan, Mutu, Gizi, Manfaat dan Label Pangan Olahan dan Izin Peredaran Pangan Produk Rekayasa Genetik (PRG).

c. Integrasi NIB

Aplikasi SIAP-UK: Penilaian Obat Pengembangan Baru, Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik, Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik Obat Tradisional, Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik Obat Kuasi, Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik Suplemen Kesehatan, Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik Kosmetika, Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Obat Tradisional, Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Obat Kuasi, Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Suplemen Kesehatan, Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Kosmetika dan Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan

5. Pengembangan SMART POM

Peningkatan kualitas pengawasan di daerah serta peningkatan peran Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara penyediaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Pengawasan Obat dan Makanan atau yang disebut DAK Nonfisik POM, dalam kerangka DAK Nonfisik Bidang Kesehatan atau disebut Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Pengalokasian DAK Nonfisik yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah ini bertujuan untuk membantu meningkatkan kegiatan dan untuk melakukan monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengalokasian tersebut sesuai pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, aplikasi SMARTPOM ini dikembangkan dengan penyesuaian menu DAK Nonfisik Tahun Anggaran 2022.

Dalam operasional aplikasi SMARTPOM, terdapat beberapa fitur tambahan yang telah disesuaikan dengan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Menu Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat Dan Makanan Tahun Anggaran 2022. Pada triwulan IV ini aplikasi SMARTPOM sudah diimplementasikan user yang bersangkutan dimana selaku user yang melakukan penginputan berasal dari Dinas Kesehatan Penerima DAK Non Fisik 2022 dan sudah dilaksanakan monitoring dan evaluasi DAK oleh unit terkait sebagai penanggung jawab kegiatan DAK Non Fisik 2022. Selain melakukan pendampingan berupa tatap muka, telah dilakukan helpdesk melalui whatsapp dan ticketing yang terdapat pada aplikasi SMARTPOM. Selama triwulan IV helpdesk yang dilakukan sebanyak 90 (sembilan puluh) layanan dan semua telah ditindaklanjuti. Dengan pelaksanaan helpdesk maupun pendampingan diharapkan aplikasi berjalan lancar dan mendukung tupoksi BPOM dalam pengawasan.

VIII. Perkuatan Peraturan Perundang-Undangan Pengawasan Obat dan Makanan

Sampai dengan triwulan IV tahun 2022, telah ditetapkan 35 (Tiga Puluh Lima) Peraturan Badan POM, 127 (Seratus Dua Puluh Tujuh) Keputusan Kepala Badan POM, dan 84 (Delapan Puluh Empat) Rumusan Perjanjian. Selain itu Badan POM telah melakukan pembahasan 1 Rancangan Undang-Undang dan 3 Rancangan Peraturan Pemerintah. Bersama dengan Kementerian Kesehatan, Badan POM turut serta dalam pembahasan RPP tentang Revisi PP 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

1 Judul Rancangan Undang-Undang

Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan.



3 Judul Rancangan Peraturan Pemerintah

1. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan
2. Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.
3. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan.

Judul Peraturan Badan POM

1. Peraturan Badan POM Nomor 1 tahun 2022 tentang Pengawasan Klaim pada Label dan Iklan Pangan Olahan.
2. Peraturan Badan POM Nomor 2 tahun 2022 tentang Pelaporan Kegiatan Industri Farmasi dan Pedagang Besar Farmasi
3. Peraturan Badan POM Nomor 3 tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika
4. Peraturan Badan POM Nomor 4 tahun 2022 tentang Program Desa dan Kelurahan Pangan Aman
5. Peraturan Badan POM Nomor 5 tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Badan POM
6. Peraturan Badan POM Nomor 6 tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan POM
7. Peraturan Badan POM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Menu Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat Dan Makanan Tahun Anggaran 2022.
8. Peraturan Badan POM Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kode Etik Dan Kode Perilaku Pegawai Di Lingkungan Badan POM
9. Peraturan Badan POM Nomor 9 Tahun 2022 tentang Persyaratan Cemaran Logam Berat Dalam Pangan Olahan
10. Peraturan Badan POM Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Uji Toksisitas Pratinik Secara In Vivo
11. Peraturan Badan POM Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Uji Bioekivalensi
12. Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2022 tentang Cara Pembuatan Obat Yang Baik di Rumah Sakit
13. Peraturan Badan POM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan
14. Peraturan Badan POM Nomor 14 tahun 2022 tentang Penarikan Dan Pemusnahan Obat Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat, Mutu, Dan Label
15. Peraturan Badan POM Nomor 15 tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans
16. Peraturan Badan POM Nomor 16 tahun 2022 tentang Pengawasan Peredaran Obat Donasi di Wilayah Indonesia

Judul Peraturan Badan POM

17. Peraturan Badan POM Nomor 17 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika
18. Peraturan Badan POM Nomor 18 tahun 2022 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat Yang Baik Di Sarana Pengolahan Produk Berbasis Sel Dan Jaringan Manusia
19. Peraturan Badan POM Nomor 19 tahun 2022 tentang Pedoman Klaim Suplemen Kesehatan
20. Peraturan Badan POM Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Badan POM Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Fungsional Di Lingkungan Badan POM
21. Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika
22. Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penerapan 2D Barcode Dalam Pengawasan Obat Dan Makanan
23. Peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2022 tentang Standar dan/atau Persyaratan Mutu Obat dan Bahan Obat
24. Peraturan Badan POM Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan
25. Peraturan Badan POM Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan
26. Peraturan Badan POM Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia
27. Peraturan Badan POM Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia
28. Peraturan Badan POM Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan
29. Peraturan Badan POM Nomor 29 Tahun 2022 tentang Jabatan Dan Kelas Jabatan Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan
30. Peraturan Badan POM Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pemasukan Obat Dan Bahan Obat Melalui Mekanisme Jalur Khusus (*Special Access Scheme*)

Judul Peraturan Badan POM

31. Peraturan Badan POM Nomor 31 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerapan Aspek CPOTB secara Bertahap
32. Peraturan Badan POM Nomor 32 Tahun 2022 Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Suplemen Kesehatan
33. Peraturan Badan POM Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
34. Peraturan Badan POM Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pengawasan Periklanan Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan
35. Peraturan Badan POM Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan POM Nomor 3 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Badan Pengawas Obat dan Makanan

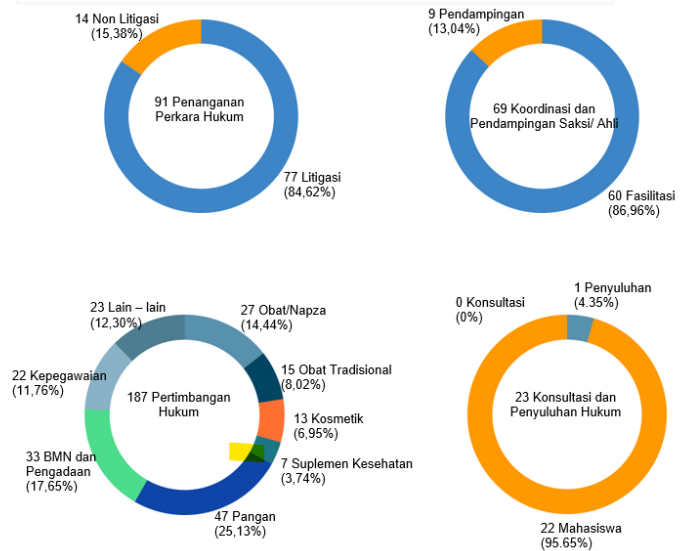
Layanan Advokasi Hukum (Pelayanan Hukum)

Peran unit kerja yang membidangi hukum/legal pada setiap instansi pemerintah terkait pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tugas di lingkungan pemerintahan adalah sebagai unit kerja yang mendukung dalam aspek hukum, agar pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tugas-tugas dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tidak menimbulkan implikasi hukum yang berisiko bagi organisasi.

Dukungan aspek hukum dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tugas-tugas Badan POM diberikan oleh Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum dan Organisasi berupa Layanan Advokasi Hukum yang terdiri dari pelaksanaan pertimbangan hukum, pelaksanaan penanganan perkara hukum, pelaksanaan pendampingan kepada saksi/ahli serta pelaksanaan konsultasi dan penyuluhan hukum.

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022

Jumlah Layanan Advokasi Hukum yang diberikan sejumlah 370 layanan yang terdiri dari:



IX. Penguatan dan Penataan Organisasi dan Tata Laksana serta Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

1. Penataan dan Penguatan Organisasi

a. Penataan dan penguatan organisasi

Penataan dan penguatan organisasi dilakukan sebagai upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan baik di unit kerja Pusat maupun di UPT BPOM. Berdasarkan hasil evaluasi wilayah kerja dalam rangka penataan UPT BPOM, BPOM menetapkan perpindahan kedudukan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir menjadi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu disertai dengan penambahan wilayah kerja. Penetapan ini tercantum pada Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang telah disampaikan kepada seluruh unit kerja dan diunggah pada *subsite jdih.pom.go.id*.

b. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Dalam rangka mewujudkan sasaran RB, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima, Menteri PANRB melakukan peninjauan pelayanan Balai Besar POM di Yogyakarta tanggal 21 Oktober 2022. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan pelayanan dan reformasi birokrasi di lingkup Balai Besar POM di Yogyakarta tetap berjalan baik dan konsisten pasca meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada 2021 dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada 2019. Pada tinjauan ini Menteri PANRB berkesempatan melakukan dialog dengan Sekretaris Utama, Inspektur Utama, Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta dan para JPT Pratama BPOM serta meninjau fasilitas dan layanan yang ada di Balai Besar POM di Yogyakarta.

2. Tata Laksana

a. Entry Meeting Pelaksanaan Audit Sertifikasi, Resertifikasi, dan Surveilans QMS ISO 9001:2015

BPOM

Kegiatan exit meeting ISO 9001:2015 merupakan pertemuan penutup pelaksanaan audit Sertifikasi, Resertifikasi, dan Surveilans ISO 9001:2015 tahun 2022 dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2022 yang dihadiri oleh Deputy Manajemen Puncak BPOM, seluruh Kepala Unit Kerja, Tim Koordinator Manajemen Representatif, Tim Koordinator Auditor Internal, *Lead Auditor* PT Sucofindo serta Perwakilan Manajemen Representatif Unit Kerja BPOM secara daring melalui *zoom meeting*. Pada pertemuan *exit meeting*, Penyedia jasa konsultansi ISO 9001:2015 dari PT Sucofindo menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan audit Sertifikasi, Resertifikasi, dan Surveilans ISO 9001:2015 tahun 2022 dengan perolehan sertifikat ISO

9001:2015 untuk 104 (seratus dua) unit organisasi yang terdiri dari Manajemen Puncak BPOM, 30 (tiga puluh) Unit Kerja Pusat, 34 (tiga puluh empat) Balai Besar/Balai POM dan 39 (tiga puluh sembilan) Loka POM di Kabupaten/Kota.



Gambar 29. Pelaksanaan Exit Meeting Audit Sertifikasi, Resertifikasi, dan Surveilan QMS ISO 9001:2015 BPOM 11 Oktober 2022

b. Tinjauan Manajemen ISO 9001:2015 BPOM

Penyelenggaraan Tinjauan Manajemen ISO 9001:2015 BPOM merupakan evaluasi atas penerapan QMS BPOM yang dilaksanakan secara periodik untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas yang berkelanjutan. Berdasarkan klausul ISO 9001:2015 9.3 Management Review, Manajemen puncak harus meninjau sistem manajemen mutu organisasi, pada selang waktu terencana, untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, efektivitas, dan keselarasan dengan arah strategis organisasi.

Evaluasi pelaksanaan QMS BPOM tahun 2022 telah dilakukan melalui audit internal dan audit eksternal. Berdasarkan hasil closing-meeting audit eksternal oleh PT Sucofindo pada tanggal 11 Oktober 2022

seluruh Unit Kerja direkomendasikan untuk memperoleh sertifikat ISO 9001:2015. Pada kesempatan ini, Sekretaris Utama selaku Deputy Manajemen Puncak menyerahkan Sertifikat QMS ISO 9001:2015 secara simbolis kepada Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik dan Direktorat Siber Obat dan Makanan.

Laporan hasil pelaksanaan Tinjauan Manajemen ISO 9001:2015 BPOM sudah disampaikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala UPT di lingkungan BPOM melalui surat Sekretaris Utama nomor B-OT.02.03.2.22.12.22.929 tertanggal 2 Desember 2022 untuk dapat ditindaklanjuti.

X. Kerjasama Internasional

1. BPOM Bangun Sinergi Wujudkan Kemandirian Produk Darah Dalam Negeri

BPOM menggagas pertemuan lintas sektor yang melibatkan Palang Merah Indonesia (PMI), Selasa Kegiatan yang mengambil tema “Forum Lintas Sektor Pengembangan Industri Fraksionasi Plasma Dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian Produk Darah Dalam Negeri” bertujuan untuk menyinergikan dukungan dan upaya berkelanjutan bagi terwujudnya kemandirian produk darah dalam negeri.



Pada dengan kegiatan tersebut, Kepala BPOM dan Ketua Umum PMI melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman / Memorandum of Understanding (MoU) untuk memperbarui kerja sama antara BPOM dengan PMI dalam rangka peningkatan mutu produk darah di Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (UDD PMI). BPOM telah menjalin kerja sama dengan PMI yang mengelola UDD di dalam negeri sejak tahun 2019. Dukungan BPOM diberikan dalam bentuk asistensi regulatori, pra-sertifikasi, serta sertifikasi CPOB kepada 18 UDD PMI di seluruh Indonesia. Pembaruan MoU ini memperluas cakupan kerja sama tersebut, yaitu untuk penyusunan regulasi terkait produk darah,

pengembangan kurikulum pelatihan bagi inspektur Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) BPOM, serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia BPOM dan PMI.

Kepala BPOM RI, Penny K. Lukito menjelaskan dalam sambutannya bahwa kebutuhan produk darah terus meningkat, baik di Indonesia maupun global. Kebutuhan produk plasma di Indonesia mencapai Rp1, 15 Triliun (USD 733,2 juta), namun seluruh produk derivat plasma yang digunakan tersebut masih merupakan produk impor dengan nilai pembelian yang tinggi. Hal yang sama diutarakan oleh Ketua Umum PMI, Jusuf Kalla terkait kapasitas industri farmasi dalam negeri yang harus sudah mumpuni dalam melakukan fraksionasi plasma.



2. Penandatanganan MoU antara BPOM dengan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka tentang Pemberdayaan Gerakan Pramuka di Bidang Keamanan serta Mutu Obat dan Makanan

Pada tanggal 25 November 2022, telah berlangsung Penandatanganan Nota Kesepahaman/ Memorandum of Understanding antara BPOM dengan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka tentang Pemberdayaan Gerakan Pramuka di Bidang Keamanan serta Mutu Obat dan Makanan di Jakarta. Penandatanganan ini dilakukan oleh Kepala BPOM RI, Penny K. Lukito bersama Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka, Budi Waseso.



MoU ini merupakan pembaruan kerja sama sebelumnya yang telah diwujudkan dengan berbagai implementasi nyata, seperti kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi obat dan makanan, pelatihan fasilitator Kwartir Daerah, bimbingan teknis kader keamanan pangan, dan berbagai Giat Pramuka Saka POM lainnya. Sejak tahun 2018, BPOM telah menginisiasi pembentukan dan pengembangan Rintisan Saka POM bersama Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM di seluruh Indonesia. Melalui Rintisan Saka POM ini, BPOM telah mengembangkan 3 (tiga) Krida sebagai wadah kegiatan, yaitu Krida Pengujian Sederhana Obat dan Makanan, Krida Pemantauan Obat dan Makanan, serta Krida Informasi Obat dan Makanan. Kepala BPOM menjelaskan sasaran dibentuknya Saka POM adalah untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kecakapan anggota Gerakan Pramuka di bidang pengawasan

Obat dan Makanan. Kepala BPOM berharap mendapat dukungan dari Kwarnas, Kwarda, dan Kwartir Cabang (Kwarcab) seluruh Indonesia dalam pengesahan Saka POM segera terwujud, pada Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka tahun 2023 yang akan datang. Senada dengan hal tersebut, Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka, Budi Waseso turut berharap nota kesepahaman ini dapat ditindaklanjuti dengan dijalankannya berbagai aktivitas yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.



XI. Sumber Daya Manusia

1. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pada triwulan IV ini telah terlaksananya pembahasan terkait evaluasi kelas jabatan dengan Kementerian PAN RB untuk jabatan pelaksana, penetapan kelas jabatan CPNS, pengusulan evaluasi jabatan fungsional Perencana Utama, Analis Kebijakan Utama, Arsiparis Utama, dan Auditor Pertama sampai dengan Utama. Selanjutnya akan dilakukan revisi peraturan BPOM setelah menunggu rekomendasi persetujuan evaluasi jabatan dari Kementerian PAN RB. Selain itu telah dilakukan pendataan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang bertujuan untuk mengetahui PPNS yang memenuhi persyaratan seleksi Calon Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (CPPPK).

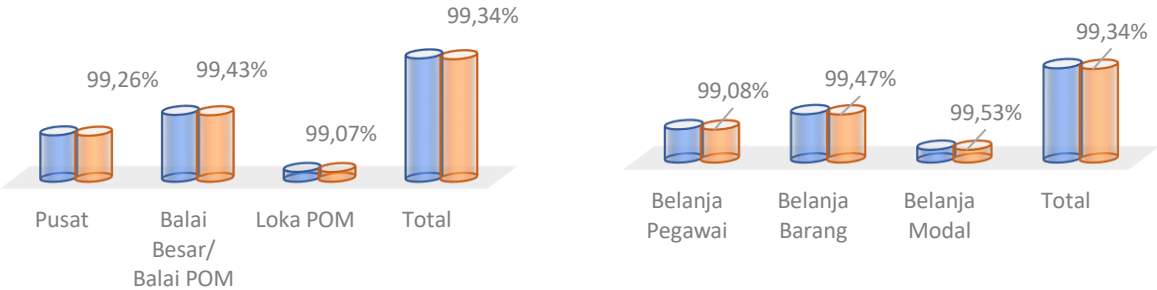
2. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Aplikasi IDEAS (Integrated Development and Training Information System) merupakan platform pengembangan kompetensi digital terintegrasi di BPOM. Aplikasi IDEAS memiliki fitur online shopping training atau pelatihan tidak terjadwal yaitu fitur yang memfasilitasi pegawai untuk mengikuti pembelajaran secara online kapanpun dan di manapun dengan memanfaatkan modul materi di aplikasi IDEAS. Fitur lain yang dimiliki aplikasi IDEAS adalah webinar/diskusi online yang dapat diikuti oleh pegawai BPOM dengan narasumber yang berasal dari internal BPOM maupun eksternal. Keunggulan lain dari IDEAS berupa penerbitan sertifikat online di mana semua data pengembangan kompetensi pada IDEAS terintegrasi dengan <https://siasn.pom.go.id>. BPOM juga memiliki aplikasi SIMPHONI yang merupakan platform knowledge management di lingkungan BPOM. Aplikasi SIMPHONI memungkinkan pegawai atau Unit BPOM untuk sharing data, informasi, dan

pengetahuan ke pegawai atau unit kerja lain. Selama tahun 2022, sebanyak 1.462 data/informasi/pengetahuan telah publish dan dikelola dalam Knowledge Management BPOM melalui aplikasi Simphoni.

XII. Realisasi Anggaran Sampai dengan Triwulan IV 2022

Total anggaran Badan POM Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.028.593.343.000,- untuk seluruh kegiatan di pusat maupun daerah. Anggaran yang terdiri dari: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. Anggaran tersebut tersebar untuk 30 Satker Pusat, 34 Balai Besar/Balai POM dan 39 Loka POM. Realisasi anggaran Triwulan IV tahun 2022 sebesar Rp2.015.201.098.442,- (99,34%) yang terdiri dari realisasi anggaran untuk Satker Pusat Rp758.809.795.524,- ,realisasi anggaran untuk seluruh Balai Besar/Balai POM Rp 1.095.468.924.028,- ,dan realisasi anggaran untuk Loka POM sebesar Rp160.922.378.890,-.



Gambar 30. Realisasi Anggaran s.d Triwulan IV 2022

	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Total
Pagu	716.294.232.000	1.039.146.399.000	273.152.712.000	2.028.593.343.000
Realisasi	709.713.067.406	1.033.626.848.725	271.861.182.311	2.015.201.098.442
%	99,08%	99,47%	99,53%	99,34%

Unit Kerja	Pagu	Realisasi	%
Pusat	764.429.578.000	758.809.795.524	99,26%
Balai Besar/ Balai POM	1.101.729.242.000	1.095.468.924.028	99,43%
Loka POM	162.434.523.000	160.922.378.890	99,07%
Total	2.028.593.343.000	2.015.201.098.442	99,34%

XIII. Pemantauan Capaian Rencana Kerja Pemerintah (RKP) BPOM

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, BPOM secara rutin telah melakukan pemantauan pelaksanaan RKP BPOM Tahun 2022. Pemantauan dilakukan terhadap perkembangan realisasi anggaran serta realisasi pencapaian sasaran kegiatan dan pencapaian sasaran program dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, juga kendala yang dihadapi untuk dapat segera diidentifikasi upaya tindak lanjut yang dibutuhkan. Pemantauan capaian RKP dilakukan per triwulan. Hasil pemantauan capaian RKP sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 sebagaimana terlampir pada buku ini.

PENUTUP

Kinerja yang ditampilkan dalam laporan ini hanya sebagian dari kinerja keseluruhan BPOM. Namun demikian para pihak terkait diharapkan mendapat gambaran jelas bahwa program dan kegiatan BPOM berorientasi pada pencapaian tujuan utama pembangunan pengawasan obat dan makanan 2021-2024 yaitu meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut BPOM akan terus berupaya untuk meningkatkan kinerjanya pada masa mendatang, dengan mengutamakan niat baik, komitmen, keterbukaan, perencanaan yang komprehensif (termasuk anggaran), pelaksanaan aksi, evaluasi dan analisis hasil, serta continuous Improvement.



LAMPIRAN I

**CAPAIAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SAMPAI DENGAN
DESEMBER**



No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
1	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Pengawasan Obat	89	Indeks	76,1	85,51%
		Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	86	Indeks	86,59	100,69%
		Persentase UMKM OT yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap	90	%	77,78	86,42%
		Indeks Pengawasan Makanan	82	Indeks	80,37	98,01%
		Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar	200	Kab/Kota	240	120,00%
		Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	70	%	50,53	72,19%
1.1	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Persentase Obat yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	92,25	%	88,02	95,41%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	83	%	87,01	104,83%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	88,5	%	84,82	95,84%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	77,5	%	87,01	112,27%
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89	%	85,27	95,81%
		Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	83	Indeks	80,22	96,65%
		Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	90	Indeks	94,54	105,04%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	77	Indeks	74,53	96,79%
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	89,45	Indeks	92,7	103,63%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	91	%	95,96	105,45%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di masing-masing wilayah kerja UPT	70	%	64,35	91,93%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	91	%	97,97	107,66%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	60	%	58,67	97,78%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	66	%	73,76	111,76%
		Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	4,28	Indeks	4,42	103,27%
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77	%	86,75	
		Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	93	Nilai	89,76	96,52%
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	2.010	Sekolah	2138	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Jumlah desa pangan aman di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	648	Desa	649	
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	255	Pasar	271	
		Persentase sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	%	74,61	74,61%
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	%	74,83	74,83%
		Persentase keberhasilan penindakan obat dan makanan	73	%	87,55	119,93%
		Indeks RB UPT	85	Indeks	87,85	103,35%
		Nilai AKIP UPT	82	Nilai	79,23	96,62%
		Indeks Profesionalitas ASN UPT	84	Indeks	82,68	98,43%
		Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium/GLP	81	%	86,54	106,84%
		Persentase laboratorium pengawasan obat dan makanan yang sesuai Good Laboratory Practise	80	%	-	-
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	Indeks	2,52	112,00%
		Nilai Kinerja Anggaran UPT	93,5	Nilai	89,77	96,01%
1.2	Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan	Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti	84	%	86,36	102,81%
		Persentase analisis kejahatan Obat dan Makanan yang berkualitas	80	%	83,33	104,16%
		Persentase data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan yang akurat	87,5	%	83,49	95,42%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase penggalangan dalam rangka cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang mendapat respon positif	92	%	100	108,70%
		Indeks RB Direktorat Cegah Tangkal	83,4	Indeks	89,69	107,54%
		Indeks profesionalisme ASN Direktorat Cegah Tangkal	84,5	Indeks	85,67	101,38%
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Cegah Tangkal yang optimal	2,25	Indeks	2,75	122,22%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Cegah Tangkal	90	Nilai	90	100,00%
1.3	Intelijen Obat dan Makanan	Persentase rekomendasi intelijen obat dan makanan yang berkualitas	80	%	83,33	104,16%
		Persentase laporan informasi yang sesuai standar	80	%	92,73	115,91%
		Persentase laporan intelijen yang sesuai standar	80	%	81,25	101,56%
		Persentase Laporan informasi dan Laporan Intelijen UPT yang sesuai Pedoman	60	%	89,84	149,73%
		Jumlah profil jaringan kejahatan Obat dan Makanan yang terpetakan	3	Jaringan	3	100,00%
		Indeks RB Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	80,8	Indeks	87,32	108,07%
		Indeks profesionalitas ASN Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	84	Indeks	84,44	100,52%
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang optimal	2,25	Indeks	2,25	100,00%
		Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	90	%	100	111,11%
1.4	Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan	Persentase sarana Produksi OT yang memenuhi persyaratan CPOTB	83	%	94,13	113,41%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase iklan OT dan SK yang memenuhi ketentuan	76	%	76,38	100,50%
		Persentase pemenuhan pedoman pengawasan OT dan SK oleh UPT	84	%	100	119,05%
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	88	Indeks	88,83	100,94%
		Persentase keputusan hasil pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	79	%	91,05	115,25%
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	76	%	80,33	105,70%
		Persentase laporan keamanan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang ditindaklanjuti tepat waktu	94	%	100	106,38%
		Persentase UPT yang dilakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	62	%	64,29	103,69%
		Persentase permohonan penilaian sarana dan produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	90	%	89,52	99,47%
		Indeks pelayanan publik di bidang pengawasan OT dan SK	4,45	Indeks	4,65	104,49%
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	85,5	Indeks	90,08	105,36%
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	82,75	Indeks	86,34	104,34%
		Indeks pengelolaan data dan informasi Unit Kerja Direktorat Pengawasan OT dan SK yang optimal	2,26	Indeks	3	132,74%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	99	%	100	101,01%
1.5	Pengawasan Produksi Pangan Olahan	Persentase industri pangan olahan yang menerapkan Manajemen Risiko	57	%	57,51	100,89%
		Persentase Peningkatan Industri pangan olahan yang telah mengimplementasikan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO)	13	%	14,81	113,92%
		Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan produksi	58	%	61,35	105,78%
		Persentase pemenuhan pelaksanaan pengawasan produksi pangan olahan oleh UPT BPOM sesuai dengan NSPK	77	%	82,88	107,64%
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	85	Indeks	85	100,00%
		Persentase keputusan hasil pengawasan Produksi Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	89	%	91,77	103,11%
		Persentase koordinasi Pengawasan Produksi Pangan fortifikasi yang dilaksanakan	80	%	94	117,50%
		Persentase tingkat pengetahuan pelaku usaha dan masyarakat terhadap Pengawasan Produksi yang diberikan	85	%	92,06	108,31%
		Jumlah kab/kota yang melaksanakan Pengawasan Produksi Pangan Olahan sesuai standar	200	Kab/Kota	210	105,00%
		Persentase keputusan penilaian sarana Produksi Pangan Olahan yang diselesaikan tepat waktu	89	%	100	112,36%
		Indeks pelayanan publik di Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang optimal	4,3	Indeks	4,61	107,21%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	88	Indeks	93,04	105,73%
		Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	85	Indeks	85,23	100,27%
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang optimal	2,25	Indeks	3	133,33%
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	91	%	100	109,89%
1.6	Pengawasan Kosmetik	Persentase sarana Kosmetik yang memenuhi ketentuan	87	%	73,22	84,16%
		Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan	87	%	79,38	91,24%
		Persentase pemenuhan Ketentuan pengawasan Kosmetik oleh Balai Besar/Balai POM/Loka POM	85	%	98,63	116,04%
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan kosmetik	84,5	Indeks	85,31	100,96%
		Persentase keputusan hasil pengawasan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	87	%	87,62	100,71%
		Persentase hasil pengawasan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor	83	%	84,83	102,20%
		Persentase laporan keamanan Kosmetik yang ditindaklanjuti tepat waktu	90	%	98,81	109,79%
		Persentase UPT yang di lakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan kosmetik	82	%	92,86	113,24%
		Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	92	%	96,35	104,73%
		Indeks Pelayanan Publik di bidang Pengawasan Kosmetik	4,51	Indeks	4,66	103,33%
		Indeks RB Direktorat Pengawasan kosmetik	81	Indeks	90,74	112,02%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan kosmetik	82	Indeks	86,82	105,88%
		Indeks Pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan kosmetik yang optimal	2,25	Indeks	3	133,33%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan kosmetik	100	%	100	100,00%
1.7	Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Persentase keputusan hasil pengawasan di bidang distribusi dan pelayanan obat yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	77	%	80,01	103,91%
		Indeks kepuasan stakeholder terhadap pelayanan publik distribusi obat	90	Indeks	90,73	100,81%
		Persentase keputusan hasil pengawasan sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian yang diselesaikan	86	%	88,93	103,41%
		Persentase keputusan hasil pengawasan pengelolaan obat pemasukan jalur khusus yang diselesaikan	86	%	92,59	107,66%
		Persentase pemenuhan standar pengawasan sarana distribusi dana pelayanan obat oleh Balai	80	%	81,01	101,26%
		Persentase Keputusan Penilaian Sarana Distribusi Obat yang Diselesaikan tepat waktu	86	%	89,26	103,79%
		Indeks pelayanan publik Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	4,2	Indeks	4,61	109,76%
		Persentase stakeholder yang mendapat regulatory assistance di bidang distribusi dan pelayanan obat	75	%	84,3	112,40%
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	93	Indeks	92,2	99,14%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	80	Indeks	83,11	103,89%
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP yang optimal	2,26	Indeks	3	132,74%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	88	%	100	113,64%
1.8	Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang pengawasan iklan obat dan ekspor impor obat, narkotika, psikotropika dan prekursor	88	Indeks	90,9	103,30%
		Indeks kepatuhan pelaku usaha dalam mutu dan keamanan obat dan NPP	94	Indeks	92,2	98,09%
		Indeks kepatuhan industri produk tembakau dalam label dan iklan	48	Indeks	54,37	113,27%
		Indeks Pelayanan Publik di Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	4,51	Indeks	4,45	98,67%
		Jumlah permohonan ekspor impor obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor yang diselesaikan tepat waktu	18100	%	19224	106,21%
		Persentase permohonan persetujuan iklan obat yang diselesaikan tepat waktu	74	Permohonan	73,23	98,96%
		Tingkat Efektivitas KIE di bidang Obat	92,59	%	93,8	101,31%
		Persentase laporan Farmakovigilans yang ditindaklanjuti	70	%	83,16	118,80%
		Persentase laporan pengawasan mutu, label, iklan obat, dan NPP yang ditindaklanjuti	87	%	86,86	99,84%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Jumlah label dan iklan produk tembakau yang diawasi yang memenuhi ketentuan	60400	Label dan Iklan	67914	112,44%
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	88,4	Indeks	95,84	108,42%
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	79	Indeks	87,98	111,37%
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif yang optimal	2,25	Indeks	3	133,33%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Ditwas KMEIONAPPZA	98	%	100	102,04%
1.9	Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan	75	%	75	100,00%
		Persentase UPT BPOM yang melakukan pengawasan sesuai standar	69	%	80,82	117,13%
		Jumlah sarana peredaran yang menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO) Peredaran	350	sarana	531	151,71%
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	85	indeks	87,51	102,95%
		Jumlah kab/kota yang melaksanakan pengawasan post market sesuai standar	200	Kab/Kota	190	95,00%
		Persentase keputusan hasil pengawasan peredaran pangan olahan yang dilakukan sesuai standar	94	%	93,43	99,39%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase pelaku usaha dan masyarakat yang meningkat pengetahuannya terhadap implementasi peraturan peredaran pangan olahan yang baik	82	%	72,95	88,96%
		Indeks Pelayanan Publik di Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	4,51	Indeks	4,89	108,43%
		Jumlah permohonan ekspor/impor yang diselesaikan tepat waktu	67000	Permohonan	68908	102,85%
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	85,5	Indeks	91,52	107,04%
		Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	87	Indeks	85,53	98,31%
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan yang optimal	2,25	Indeks	3	133,33%
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan yang baik	93	%	93	100,00%
1.10	Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Persentase Sarana produksi Obat yang mandiri dalam Pemenuhan CPOB	60	%	70	116,67%
		Persentase fasilitas produksi produk JKN, produk highrisk lainnya, serta bahan baku obat yang diawasi sesuai standar	90	%	105,13	116,81%
		Persentase tindak lanjut yang berkualitas dari hasil pengawasan sarana produksi di Balai	95	%	100	105,26%
		Persentase hasil pengawasan sarana produksi yang ditindaklanjuti	76	%	76,92	101,21%
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Publik di bidang pengawasan sarana produksi obat	88	%	90,4	102,73%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase sarana produksi obat JKN, Bahan Baku Obat, dan obat highrisk lainnya yang mematuhi persyaratan CPOB	76	%	76,2	100,26%
		Persentase Keputusan penilaian fasilitas produksi Bahan Baku Obat, Obat, Produksi Biologi dan Sarana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	75	%	77,54	103,39%
		Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	4,01	Indeks	4,54	113,22%
		Persentase tahapan pemenuhan fasilitas produksi obat baru yang diterbitkan keputusan dalam rangka pengawasan	70	%	70,83	101,19%
		Nilai RB Ditwas Produksi ONPP	93	Indeks	92,09	99,02%
		Indeks Profesionalitas ASN Ditwas Produksi ONPP	80	Indeks	87,13	108,91%
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan NPP yang optimal	2,26	Indeks	3	132,74%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Ditwas Produksi ONPP	95	%	95	100,00%
1.11	Registrasi Pangan Olahan	Persentase pangan olahan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu sebelum diedarkan	90	%	90,56	100,62%
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Registrasi Pangan Olahan	85	Indeks	85,58	100,68%
		Persentase hasil penilaian Registrasi Pangan Olahan yang diselesaikan tepat waktu	95	%	95,98	101,03%
		Persentase pengaduan terkait Registrasi Pangan Olahan yang ditindaklanjuti	100	%	100	100,00%
		Indeks pelayanan publik di Direktorat Registrasi Pangan Olahan	4,65	%	4,79	103,01%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase keputusan registrasi pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	Indeks	83,87	93,19%
		Persentase pendampingan di bidang Registrasi pangan olahan yang efektif	94	%	91,18	97,00%
		Indeks RB Direktorat Registrasi Pangan Olahan	98,2	Indeks	97,49	99,28%
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi Pangan Olahan	80	Indeks	86,32	107,90%
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Registrasi Pangan Olahan yang optimal	2,26	Indeks	2,5	110,62%
		Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Registrasi Pangan Olahan	98	%	100	102,04%
1.12	Registrasi Obat	Persentase obat yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebelum diedarkan	89	%	84,13	94,53%
		Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang registrasi Obat	86	Indeks	87,35	101,57%
		Persentase keputusan registrasi obat yang diselesaikan sesuai standar	76	%	66,98	88,13%
		Persentase hasil penilaian registrasi obat yang diselesaikan tepat waktu	76	%	76,56	100,74%
		Persentase pengaduan/keluhan/masukan terkait registrasi obat yang ditindaklanjuti	100	%	100	100,00%
		Indeks Pelayanan Publik di Direktorat Registrasi Obat	4,2	Indeks	4,51	107,38%
		Persentase sarana UK/Lab BE yang diinspeksi dan memenuhi CUKB	84	%	90	107,14%
		Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar registrasi obat	100	%	100	100,00%
		Indeks RB Direktorat Registrasi Obat	88,1	Indeks	90,92	103,20%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi Obat	88,9	Indeks	88,94	100,04%
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Registrasi Obat yang optimal	2,25	Indeks	2	88,89%
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Registrasi Obat	94	%	100	106,38%
1.13	Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang memenuhi syarat keamanan dan mutu sebelum diedarkan	93,5	%	92,8	99,25%
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di bidang registrasi OT, SK, Notifikasi Kosmetik, Penilaian Uji Praktek/Klinik dan DIP	84	Indeks	86,96	103,52%
		Persentase hasil penilaian registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praktek/klinik dan DIP yang diselesaikan tepat waktu	82,5	%	94,2	114,18%
		Persentase pengaduan terkait registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praktek/ Klinik dan DIP yang ditindaklanjuti	74	%	86,33	116,66%
		Indeks pelayanan publik di Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praktek/ Klinik	4,45	Indeks	4,79	107,64%
		Persentase keputusan registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Notifikasi Kosmetik yang diselesaikan sesuai standar	82,5	%	86,45	104,79%
		Persentase pendampingan di bidang registrasi OT, SK, Notifikasi Kosmetik, Penilaian Uji Praktek/Klinik dan DIP yang efektif	77	%	93,14	120,96%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar di lingkup registrasi obat tradisional	85	%	85,72	100,85%
		Indeks RB Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos	87,2	Indeks	91,5	104,93%
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos	86,5	Indeks	86,85	100,40%
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos yang optimal	2,25	%	2,5	111,11%
		Tingkat Efektivitas penggunaan anggaran Direktorat Registrasi OT, SK dan Kosmetik	97	%	100	103,09%
1.14	Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	89	Indeks	79,73	89,58%
		Persentase standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang disusun sesuai tahapan penyusunan	95,5	%	100	104,71%
		Persentase Sosialisasi standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang efektif kepada stakeholder	91	%	117	128,57%
		Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, dan khasiat/manfaat Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	95,25	%	99	103,94%
		Indeks RB Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	86,3	Indeks	94	108,92%
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	88	Indeks	88	100,00%
		Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal	2,75	Indeks	3	109,09%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	100	%	100	100,00%
1.15	Standardisasi Pangan Olahan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Pangan Olahan	87	Indeks	69,08	79,40%
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	85	Indeks	87,02	102,38%
		Persentase standar pangan olahan yang sudah disusun sesuai timeline tahapan penyusunan	93	%	99,5	106,99%
		Persentase sosialisasi standar pangan olahan kepada stakeholder yang efektif	90	%	92,32	102,58%
		Persentase fasilitasi pengembangan inovasi makanan melalui standar	84	%	93	110,71%
		Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, gizi dan manfaat pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu	90	%	98,59	109,54%
		Indeks pelayanan publik di bidang standardisasi pangan olahan	4,45	Indeks	4,51	101,35%
		Indeks reformasi birokrasi Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	88,4	Indeks	94,24	106,61%
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	86,5	Indeks	87,03	100,61%
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Standardisasi Pangan Olahan yang optimal	2,25	Indeks	2,75	122,22%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	100	%	100	100,00%
1.16	Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat	89,7	Indeks	83,43	93,01%
		Persentase sosialisasi standar ONPPZA kepada stakeholders yang efektif	89	%	94,32	105,98%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase standar ONAPPZA yang disusun dibanding dengan yang direncanakan	89	%	100	112,36%
		Indeks RB Direktorat Standardisasi ONPPZA	87,3	Indeks	90,98	104,22%
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi ONPPZA	82	Indeks	86,29	105,23%
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Standardisasi ONPPZA yang optimal	2,25	Indeks	2,50	111,11%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Standardisasi ONPPZA	100	%	100	100,00%
1.17	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	Persentase PKP/fasilitator yang melakukan pendampingan kepada UMK pangan olahan sesuai dengan pedoman	70	%	70,89	101,27%
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	87,5	Indeks	91	104,00%
		Persentase Kab/Kota yang menerapkan peraturan keamanan pangan untuk IRTP	35	%	37	105,71%
		Jumlah Kab/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	240	Kab/Kota	240	100,00%
		Persentase kader/fasilitator keamanan pangan yang berpartisipasi dalam pengawasan Makanan	95	%	102,5	107,89%
		Jumlah PKP/fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	240	UMK	288	120,00%
		Indeks pelayanan publik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha	3,81	Indeks	4,68	122,83%
		Jumlah pemda dan stakeholder yang diintervensi keamanan pangan	322	Pemda	350	108,70%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Jumlah kader yang memahami prinsip keamanan pangan	500	Kader/fasilitator	503	100,60%
		Tingkat efektivitas KIE makanan	93,56	%	94,23	100,72%
		Persentase UPT BPOM yang melakukan pendampingan pelaku usaha dan pemberdayaan masyarakat terkait keamanan pangan sesuai pedoman	85	%	85,3	100,35%
		Indeks RB Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	93	Indeks	91,64	98,54%
		Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	80	Indeks	86,73	108,41%
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal di Dit. PMPU	2,26	Indeks	2,75	121,68%
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	92	%	100	108,70%
1.18	Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Laboratorium/ Pengujian	81	%	81,54	100,67%
		Persentase pemenuhan grand design penguatan laboratorium pengujian Obat dan Makanan dan penguatan Balai POM	20	%	20	100,00%
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik di PPPOMN	91	Indeks	92,64	101,80%
		Persentase laboratorium Balai Besar/Balai POM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	80	%	91,18	113,98%
		Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan	82,6	%	84,23	101,97%
		Persentase Baku Pembanding yang ditetapkan sesuai kebutuhan	81,5	%	81,99	100,60%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase alat laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang dikalibrasi sesuai standar	100	%	100,57	100,57%
		Persentase sampel Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti tepat waktu	93	%	96,9	104,19%
		Indeks Pelayanan Publik PPPOMN	4,3	Indeks	4,77	110,93%
		Persentase jejaring laboratorium Obat dan Makanan yang diikuti secara aktif	71	%	71	100,00%
		Indeks RB PPPOMN	87,6	Indeks	89,19	101,82%
		Nilai AKIP PPPOMN	78,7	Nilai	83,99	106,72%
		Indeks Profesionalitas ASN PPPOMN	86,25	Indeks	86,26	100,01%
		Persentase Status Akreditasi	71	nilai	71	100,00%
		Indeks pengelolaan data dan informasi PPPOMN yang optimal	2,25	Indeks	2,50	111,11%
		Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN	94,1	nilai	91,48	97,22%
1.19	Penyidikan tindak pidana di bidang obat dan makanan	Persentase Keberhasilan Penyidikan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Direktorat Penyidikan	68	%	90,69	133,37%
		Persentase Pemenuhan Nilai Kinerja Penyidikan oleh UPT Badan POM	82	%	100	121,95%
		Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Lintas Sektor di Bidang Penyidikan yang Ditindaklanjuti	80	%	83,33	104,16%
		Persentase Perkara yang Meningkat Tahapan Penyelesaiannya dengan Adanya Dukungan Teknis	49	%	56	114,29%
		Persentase Pendalaman Informasi Penyidikan yang Berhasil menjadi Laporan Kejadian	60	%	60	100,00%
		Persentase Barang Bukti yang Selesai Ditangani sesuai Standar	60	%	46	76,67%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks Reformasi Birokrasi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	63,8	Indeks	88,34	138,46%
		Indeks Profesionalisme ASN Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	84	Indeks	85,2	101,43%
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang Optimal	2,26	Indeks	2	88,50%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	90	%	100	111,11%
1.20	Riset dan kajian di bidang obat dan makanan	Persentase riset dan kajian Pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	78	%	78,86	101,10%
		Persentase riset dan kajian yang sesuai dengan perencanaan	100	%	100	100,00%
		Persentase kesesuaian penyelenggaraan riset dan kajian dengan pedoman riset	94	%	94,38	100,40%
		Nilai kualitas diseminasi hasil riset dan kajian	80	Nilai	80	100,00%
		Indeks RB Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	85,2	Indeks	87,17	102,31%
		Nilai AKIP Pusat Riset Kajian Obat dan Makanan	78,1	Nilai	80,48	103,05%
		Indeks profesionalitas ASN Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	86,7	Nilai	86,59	99,87%
		Indeks pengelolaan data dan informasi Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan yang optimal	2,25	Indeks	2,5	111,11%
		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	91,3	nilai	88,19	96,59%
1.21	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos	81	Indeks	92,44	114,12%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase Pemda yang menerapkan program keamanan OT, SK, dan Kosmetik	50	%	83,33	166,66%
		Persentase Duta yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat	84	%	94,22	112,17%
		Persentase pemda yang diintervensi dalam rangka pendampingan UMKM dan penerapan keamanan OT, Kos dan SK	76	%	80	105,26%
		Persentase pemda yang diintervensi dalam pemberdayaan masyarakat di bidang keamanan OT, SK, dan Kos	50	%	87,5	175,00%
		Persentase UPT BPOM yang melakukan pemberdayaan masyarakat	60	%	100	166,67%
		Persentase UPT BPOM yang melakukan pemberdayaan pelaku usaha	60	%	72,6	121,00%
		Persentase fasilitator pemberdayaan pelaku usaha UMKM OT yang sesuai standard	95	%	95,89	100,94%
		Persentase fasilitator pemberdayaan pelaku usaha UMKM Kosmetik yang sesuai standard	95	%	100	105,26%
		Tingkat efektivitas KIE OT, Kos dan SK	94,19	%	95,7	101,60%
		Indeks pelayanan publik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha OT, Kos dan SK	4,01	Indeks	4,06	101,25%
		Jumlah komunitas masyarakat yang ditingkatkan peran sertanya dalam pengawasan OT, SK, dan Kos	274	komunitas	277	101,09%
		Indeks RB Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	81	Indeks	88,14	108,81%
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	85	Indeks	86,97	102,32%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, Kos dan SK yang optimal	2,1	Indeks	3	142,86%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	99	%	99,93	100,94%
1.22	Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber	Persentase Rekomendasi Analisis Siber di bidang Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	83	%	84,97	102,37%
		Persentase Hasil Patroli Siber yang ditindaklanjuti	78	%	78,9	101,15%
		Persentase Profil Pelanggaran/Kejahatan Siber Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	83	%	84,5	101,81%
		Persentase Hasil Analisis Digital Forensik yang dimanfaatkan	88	%	91,52	104,00%
		Indeks Reformasi Birokrasi Direktorat Siber Obat dan Makanan	76	Indeks	62,25	81,91%
		Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Direktorat Siber Obat dan Makanan	86,7	Indeks	85,85	99,02%
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Siber Obat dan Makanan yang Optimal	2,25	Indeks	2,5	111,11%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Siber Obat dan Makanan	89	%	100	112,36%
2	Program Dukungan Manajemen	Nilai RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama	33,21	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP	Opini	WTP	WTP
		Nilai AKIP BPOM di lingkup Sekretariat Utama	73,33	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai Kinerja Anggaran BPOM	93,5	Nilai	94,83	101,42%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	88	Indeks	95,17	108,15%
		Indeks Kepuasan Media	74,5	Indeks	73,55	98,72%
		Indeks Opini Publik BPOM	79	Indeks	84,76	107,29%
		Persentase kerja sama yang efektif	86	%	86,62	100,72%
		Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	6,02	Nilai	5,67	94,19%
		Nilai Evaluasi Internal Akutabilitas Kinerja BPOM	8,66	Nilai	8,47	97,81%
		Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM	4	Indeks	3,729	93,23%
		Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi	0,99	%	0,9993	100,94%
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	93	%	93	100,00%
2.1	Peningkatan penyelenggaraan Kerjasama dan Hubungan Masyarakat BPOM	Jumlah negara yang mendapatkan dukungan penguatan di bidang obat dan makanan dalam skema kerja sama selatan-selatan (KSST)	2	Negara	2	100,00%
		Persentase dokumen kerja sama yang diselesaikan tepat waktu	83	%	87,7	105,66%
		Indeks RB Biro Kerja Sama dan Humas	78,5	Indeks	87,76	111,80%
		Indeks Profesionalitas ASN Biro Kerja Sama dan Humas	82	Indeks	78,4	95,61%
		Indeks pengelolaan data dan informasi Biro Kerja Sama dan Humas	2,25	Indeks	2,5	111,11%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Kerja Sama dan Humas	90	%	100	111,11%
		Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	99,84	%	97,68	97,84%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase peran Badan POM dalam pertemuan Bilateral, Regional dan Multilateral	86	%	86,59	100,69%
		Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti	66	%	76,67	116,17%
		Persentase publikasi kinerja BPOM sesuai agenda setting	95	%	98,58	103,77%
		Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86	%	86,68	100,79%
		Indeks kepuasan media	74,5	Indeks	73,55	98,72%
		Indeks opini publik BPOM	79	Indeks	84,76	107,29%
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama dan Humas dan Humas	3,85	Indeks	3,83	99,48%
2.2	Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan	Nilai RB BPOM Penguatan Akuntabilitas	4,48	Nilai	4,07	90,85%
		Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM	73,33	Nilai	71,86	98,00%
		Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) BPOM	95	Nilai	87,6	92,21%
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPOM	95,22	Nilai	95,87	100,68%
		Persentase kesesuaian Laporan Keuangan BPOM yang disusun dengan SAP	100	%	100	100,00%
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro Perencanaan dan Keuangan	3,82	Indeks	3,48	91,10%
		Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan satker terhadap pedoman	71,04	%	58,6	82,49%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan BPOM yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar	100	%	88	88,00%
		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan SETTAMA yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar	100	%	80	80,00%
		Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis Pimpinan	83,5	%	90,02	107,81%
		Indeks RB Biro Perencanaan dan Keuangan	74,7	Indeks	89,58	119,92%
		Indeks Profesionalitas ASN Biro Perencanaan dan Keuangan	82	Indeks	84	102,44%
		Indeks pengelolaan data dan informasi Biro Perencanaan dan Keuangan	2,25	Indeks	2,25	100,00%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan	100	%	100	100,00%
2.3	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan tata laksana	Nilai RB BPOM Penataan peraturan perundang-undangan	4,5	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai RB BPOM Penataan dan penguatan organisasi	7,41	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai RB BPOM Penataan tata laksana	5,47	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai RB BPOM Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,76	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan dan Informasi	88	Indeks	95,17	108,15%
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro Hukum dan Organisasi	3,75	Indeks	3,75	100,00%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	100	%	100	100,00%
		Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	100	%	100	100,00%
		Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun	100	%	100	100,00%
		Persentase Advokasi Hukum yang ditindaklanjuti	100	%	100	100,00%
		Persentase Layanan Pengaduan dan Informasi yang selesai ditindaklanjuti	99,4	%	99,7	100,30%
		Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan yang dilaksanakan	94,37	%	94,54	100,18%
		Indeks Pelayanan Publik	4,55	Indeks	4,90	107,69%
		Indeks RB Biro Hukum dan Organisasi	86,25	Indeks	92,02	106,69%
		Indeks Profesionalitas ASN Biro Hukum dan Organisasi	85	Indeks	82,98	97,62%
		Indeks pengelolaan data dan informasi Biro Hukum dan Organisasi	2,25	Indeks	2,25	100,00%
		Tingkat efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Hukum dan Organisasi	95,5	%	95,5	100,00%
2.4	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Nilai RB BPOM Penataan Sistem Manajemen SDM	5,59	Nilai	5,59	100,00%
		Indeks Sistem Merit	Level 4 (0.89)	Indeks	0,94	105,62%
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro SDM	3,44	Indeks	3,55	103,20%
		Persentase ASN BPOM Yang Ditingkatkan Kariernya Sesuai Pedoman Pola Karir	75	Indeks	86,58	115,44%
		Persentase ASN BPOM yang Memiliki Kinerja Berkriteria Minimal Baik	92	%	99,80	108,48%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks Kesejahteraan Pegawai	3,06	Indeks	3,32	108,50%
		Persentase Unit Kerja yang sudah memiliki perencanaan kebutuhan ASN yang Baik	72	%	75,53	104,90%
		Persentase layanan kepegawaian berbasis digital yang diimplementasikan sesuai perencanaan	80	%	90	112,50%
		Indeks RB Biro SDM	83,5	Indeks	94,93	113,69%
		Indeks Profesionalitas ASN Biro SDM	79	Indeks	81,04	102,58%
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Biro SDM	2,25	Indeks	2,25	100,00%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro SDM	100	%	100	100,00%
2.5	Pengembangan SDM Aparatur Badan POM	Persentase SDM BPOM yang memenuhi Standar Kompetensi	79	%	80,39	101,76%
		Jumlah SDM pengawas obat dan makanan yang tersertifikasi sesuai standar	875	SDM	956	109,26%
		Nilai RB BPOM Manajemen Perubahan	4,66	Nilai	4,66	100,00%
		Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM.	60	%	69	115,00%
		Jumlah Kerja Sama Pengembangan Kompetensi yang ditindaklanjuti.	82	Kerja Sama	88,23	107,60%
		Nilai Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi	4,45	Nilai	4,63	104,04%
		Persentase SDM POM yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan pengembangan kompetensi	92	%	98,84	107,43%
		Persentase layanan pembinaan PFM yang dilaksanakan tepat waktu	50	%	74,06	148,12%
		Nilai kepuasan Layanan PFM	4	Nilai	4,61	115,25%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase realisasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan.	88	Nilai	89,58	101,80%
		Indeks Reformasi Birokrasi PPSDM POM	85	Nilai	89,15	104,88%
		Nilai AKIP PPSDM POM	82	Indeks	79,48	96,93%
		Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM	84	Nilai	82,76	98,52%
		Indeks pengelolaan data dan informasi di PPSDM POM yang optimal	2,26	Indeks	3,00	132,74%
		Nilai Kinerja Anggaran PPSDM POM	93,5	Nilai	89,68	95,91%
		Tingkat efisiensi penggunaan Anggaran PPSDM POM	94	%	100	106,38%
2.6	Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan	Indeks SPBE BPOM	3,1	Indeks	3,12	100,65%
		Indeks Kepuasan Layanan TIK	3,4	Indeks	3,4	100,00%
		Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu	95	%	99,38	104,61%
		Persentase Pemenuhan Bussines Continuity Management	31	%	32,7	105,48%
		Indeks CSIRT (Computer Security Indeks Respon Time)	3,6	%	4,04	112,22%
		Persentase Pemanfaatan Layanan Perpustakaan	80	%	81,53	101,91%
		Jumlah Data Berbagi Pakai	15	%	15	100,00%
		Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir	100	%	108,7	108,70%
		Persentase sistem informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Real Time	70	Nilai	73,45	104,93%
		Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan Roadmap TIK	100	%	100	100,00%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks RB Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	80,2	Indeks	71,47	89,11%
		Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	84,4	nilai	81	95,97%
		Indeks Profesionalitas ASN Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	78	Indeks	82,6	105,90%
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal	3	Indeks	3	100,00%
		Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data dan Keamanan	50	%	53,16	106,32%
		Sertifikasi ISO 27001	1	sertifikat	1	100,00%
		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	93,6	Nilai	91,83	98,11%
2.7	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	6,2	Nilai	5,67	91,45%
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,66	Nilai	8,47	97,81%
		Nilai rata-rata Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Unit Kerja di Wilayah Inspektorat I	3	Level	3	100,00%
		Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi mitra kerja Inspektorat I	99,01	%	99,91	100,91%
		Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap standar akuntansi pemerintah Inspektorat I				
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	93	%	94,40	101,51%
		Indeks kepuasan mitra pengawasan intern mitra kerja Inspektorat I	85,7	Indeks	86,12	100,49%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	87	Indeks	86,82	99,79%
		Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat I yang sesuai standar mutu	100	%	100	100,00%
		Nilai peer review terhadap pengawasan intern	75	Nilai	Sejak TW III sudah tidak dilakukan perhitungan lagi (sesuai dengan perubahan renstra terbaru)	100,00%
		Persentase rekomendasi pengawasan intern Inspektorat I yang ditindaklanjuti	94	%	94,10	100,11%
		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas	100	%	100	100,00%
		Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu	93	%	98,88	106,32%
		Persentase rekomendasi hasil reviu PMPRB Unit Kerja Eselon I yang ditindaklanjuti pada mitra kerja Inspektorat I	100	%	88,12	88,12%
		Persentase rekomendasi survei kepuasan masyarakat (SKM) yang ditindaklanjuti	85	%	90,12	106,02%
		Indeks RB Inspektorat I	78	%	84,42	108,23%
		Level Kapabilitas APIP	4	Indeks	3	75,00%
		Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	87,15	Indeks	85,86	98,52%
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat I yang Optimal	2,25	Indeks	3	133,33%
2.8	Pengawasan dan Peningkatan	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat I	90	Indeks	75	83,33%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
	Akuntabilitas Aparatur II					
		Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	6,02	Nilai	5,67	94,19%
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,66	Nilai	8,47	97,81%
		Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi mitra kerja Inspektorat II	4	Level	3,64	91,00%
		Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi lingkup mitra kerja Inspektorat II Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap standar akuntansi pemerintah Inspektorat II	99,01	%	99,96	100,96%
		Indeks kepuasan mitra pengawasan intern mitra kerja Inspektorat II	85,7	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	87	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat II yang sesuai standar mutu	100	%	100	100,00%
		Nilai peer review terhadap pengawasan intern	75	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase rekomendasi pengawasan intern Inspektorat II yang ditindaklanjuti	94	%	97,65	103,88%
		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas	100	%	100	100,00%
		Persentase permintaan layanan konsultasi mitra kerja Inspektorat II yang ditindaklanjuti tepat waktu	93	%	95,93	103,15%
		Persentase rekomendasi hasil monev pelaksanaan RB Badan POM yang ditindaklanjuti	100	%	24,27	24,27%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase rekomendasi hasil reviu PMPRB Unit Kerja Eselon I yang ditindaklanjuti	100	%	93,98	93,98%
		Indeks RB Inspektorat II	85,1	Indeks	91,77	107,84%
		Level Kapabilitas APIP	4	Indeks	3	75,00%
		Indeks profesionalitas ASN Inspektorat II	86	%	85,67	99,62%
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat II yang Optimal	2,25		3	133,33%
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat II	90	%	100	111,11%
2.9	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	91	Nilai	98,24	107,96%
		Indeks Pengelolaan Aset	2.93	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	72	Indeks	84,23	116,99%
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro Umum	3,75	Indeks	3,6	96,00%
		Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Sesuai Perencanaan	100	Persen	100	100,00%
		Persentase Unit Kerja yang Mampu Mengelola Arsip dengan Baik Sesuai Standar Pengelolaan Kearsipan	88	Persen	100	113,64%
		Persentase Satker yang mampu Mengelola BMN dengan Baik	50	Persen	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Pemanfaatan Sistem Pengadaan Barang/Jasa oleh Satker	85	Level	85	100,00%
		Persentase keberhasilan koordinasi dalam layanan keprotokolan dan kesekretariatan pimpinan	86	Persen	93,21	108,38%
		Indeks RB Biro Umum	83,2	Indeks	86,71	104,22%
		Indeks Profesionalitas ASN Biro Umum	75	Indeks	77,71	103,61%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Biro Umum	2,25	Indeks	2,5	111,11%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Umum	90	%	100	111,11%



LAMPIRAN II

SERAPAN ANGGARAN

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

SAMPAI DENGAN

DESEMBER

**SUMBER: APLIKASI OMSPAN
(Per 31 Desember 2022)**



A. UNIT PUSAT

NO	UNIT KERJA	TOTAL PAGU		
		PAGU	REALISASI	%
1	Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat Dan Makanan	370.989.800.000	365.812.917.814	98,6046%
1.1	Biro Kerjasama	11.981.934.000	11.911.559.934	99,4127%
1.2	Biro Perencanaan dan Keuangan	18.189.911.000	18.166.771.238	99,8728%
1.3	Biro Hukum dan Organisasi	12.120.615.000	12.058.072.447	99,4840%
1.4	Biro Umum	137.484.173.000	136.230.040.445	99,0878%
1.5	Biro Sumber Daya Manusia	191.213.167.000	187.446.473.750	98,0301%
2	Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	46.131.370.000	46.122.767.877	99,9814%
2.1	Dit. Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	7.191.118.000	7.190.659.845	99,9936%
2.2	Dit. Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor Dan Zat Adiktif	9.868.389.000	9.868.253.204	99,9986%
2.3	Dit. Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	9.892.831.000	9.889.169.304	99,9630%
2.4	Dit. Registrasi Obat	10.553.079.000	10.550.501.844	99,9756%
2.5	Dit. Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	8.625.953.000	8.624.183.680	99,9795%
3	Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	43.854.522.000	43.845.541.410	99,9795%
3.1	Dit. Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	9.631.486.000	9.631.406.913	99,9992%
3.2	Dit. Pengawasan Kosmetik	8.140.834.000	8.139.426.374	99,9827%

NO	UNIT KERJA	TOTAL PAGU		
		PAGU	REALISASI	%
3.3	Dit. Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	9.463.402.000	9.463.329.435	99,9992%
3.4	Dit. Standadisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	5.795.193.000	5.795.180.949	99,9998%
3.5	Dit. Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	10.823.607.000	10.816.197.739	99,9315%
4	Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	52.340.601.000	52.333.150.364	99,9858%
4.1	Dit. Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	12.385.556.000	12.384.419.198	99,9908%
4.2	Dit. Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	11.381.960.000	11.380.049.550	99,9832%
4.3	Dit. Registrasi Pangan Olahan	8.568.000.000	8.566.673.780	99,9845%
4.4	Dit. Standdrisasi Pangan Olahan	7.553.523.000	7.551.574.212	99,9742%
4.5	Dit. Pengawasan Produksi Pangan Olahan	12.451.562.000	12.450.433.624	99,9909%
5	Deputi Bidang Penindakan	39.233.907.000	39.233.162.426	99,9981%
5.1	Dit. Siber Obat dan Makanan	17.920.721.000	17.920.120.749	99,9967%
5.2	Dit. Intelijen Obat dan Makanan	6.828.900.000	6.828.879.133	99,9997%
5.3	Dit. Penyidikan Obat dan Makanan	6.380.715.000	6.380.653.394	99,9990%
5.4	Dit. Cegah Tangkal	8.103.571.000	8.103.509.150	99,9992%
6	Inspektorat Utama	24.991.492.000	24.945.926.914	99,8177%
6.1	Inspektorat I	19.196.465.000	19.152.504.546	99,7710%
6.2	Inspektorat li	5.795.027.000	5.793.422.368	99,9723%
7	Pusat Pengembangan Pengujian Obat Dan Makanan Nasional	74.760.234.000	74.697.578.720	99,9162%
8	Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	18.748.245.000	18.576.157.006	99,0821%
9	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	49.107.869.000	49.097.659.353	99,9792%

NO	UNIT KERJA	TOTAL PAGU		
		PAGU	REALISASI	%
10	Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan	44.271.538.000	44.144.933.640	99,7140%
	TOTAL SATKER PUSAT	764.429.578.000	758.809.795.524	99,26%

B. BALAI BESAR / BALAI POM

NO	UNIT KERJA	TOTAL PAGU		
		PAGU	REALISASI	%
1	SOFIFI	17.129.458.000	17.121.991.838	99,956%
2	BENGKULU	26.487.829.000	26.467.514.246	99,923%
3	SURABAYA	55.233.749.000	55.190.271.448	99,921%
4	GORONTALO	18.509.517.000	18.493.621.531	99,914%
5	SEMARANG	52.668.323.000	52.603.755.839	99,877%
6	TARAKAN	9.712.947.000	9.696.412.164	99,830%
7	BATAM	31.097.260.000	31.042.152.707	99,823%
8	MANADO	30.662.347.000	30.606.936.491	99,819%
9	MAMUJU	20.374.498.000	20.335.183.405	99,807%
10	PEKAN BARU	33.279.336.000	33.203.761.197	99,773%
11	MATARAM	28.558.092.000	28.484.477.969	99,742%
12	JAKARTA	43.705.622.000	43.586.926.108	99,728%
13	SAMARINDA	26.897.973.000	26.821.238.705	99,715%
14	BANDUNG	60.974.131.000	60.788.559.763	99,696%
15	PALANGKARAYA	23.877.264.000	23.802.888.546	99,689%
16	KENDARI	28.775.189.000	28.682.794.271	99,679%
17	PANGKAL PINANG	18.537.707.000	18.477.261.532	99,674%
18	AMBON	22.551.018.000	22.468.379.078	99,634%
19	MEDAN	48.244.078.000	48.066.900.696	99,633%

NO	UNIT KERJA	TOTAL PAGU		
		PAGU	REALISASI	%
20	MANOKWARI	18.992.728.000	18.921.569.845	99,625%
21	PONTIANAK	24.972.915.000	24.870.531.632	99,590%
22	PALU	25.096.625.000	24.966.053.178	99,480%
23	BANDA ACEH	24.379.498.000	24.250.597.394	99,471%
24	KUPANG	31.967.898.000	31.785.817.568	99,430%
25	BANDAR LAMPUNG	32.180.208.000	31.980.033.710	99,378%
26	SERANG	26.462.239.000	26.257.778.552	99,227%
27	MAKASSAR	54.079.932.000	53.605.935.082	99,124%
28	JAMBI	29.835.310.000	29.555.546.730	99,062%
29	YOGYAKARTA	38.363.688.000	37.995.596.539	99,041%
30	JAYAPURA	25.533.301.000	25.286.997.411	99,035%
31	PALEMBANG	30.322.566.000	30.000.766.748	98,939%
32	DENPASAR	40.794.909.000	40.264.224.303	98,699%
33	PADANG	42.082.322.000	41.525.783.599	98,678%
34	BANJARMASIN	59.388.765.000	58.260.664.203	98,100%
	TOTAL SATKER BALAI	1.101.729.242.000	1.095.468.924.028	99,43%

C. LOKA POM

NO	UNIT KERJA	TOTAL PAGU		
		PAGU	REALISASI	%
1	KOTA DUMAI	4.706.057.000	4.706.012.735	99,999%
2	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	3.815.929.000	3.815.526.691	99,989%
3	KABUPATEN BELITUNG	3.163.310.000	3.160.994.485	99,927%
4	KABUPATEN JEMBER	3.829.000.000	3.824.732.123	99,889%
5	KOTA SURAKARTA	4.873.216.000	4.867.499.929	99,883%
6	KABUPATEN ENDE	5.006.234.000	4.997.867.817	99,833%
7	KABUPATEN SORONG	4.041.896.000	4.034.496.216	99,817%
8	KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	3.346.329.000	3.340.001.660	99,811%
9	KOTA PALOPO	4.462.699.000	4.452.615.312	99,774%
10	KOTA PAYAKUMBUH	4.740.678.000	4.728.509.172	99,743%
11	KOTA BALIKPAPAN	3.945.658.000	3.933.243.281	99,685%
12	KABUPATEN TANAH BUMBU	3.332.554.000	3.320.990.180	99,653%
13	KABUPATEN TANGERANG	4.502.257.000	4.486.430.986	99,648%
14	KOTA TASIKMALAYA	5.620.990.000	5.600.421.245	99,634%
15	KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	3.759.303.000	3.745.198.061	99,625%
16	KABUPATEN PULAU MOROTAI	3.042.076.000	3.030.187.917	99,609%
17	KABUPATEN KEDIRI	4.262.532.000	4.244.469.069	99,576%
18	KOTA BAUBAU	4.790.923.000	4.766.315.065	99,486%
19	KABUPATEN TULANGBAWANG	3.334.675.000	3.313.892.966	99,377%
20	KABUPATEN BULELENG	6.211.514.000	6.167.911.900	99,298%
21	KABUPATEN SANGGAU	3.401.300.000	3.375.945.428	99,255%
22	KABUPATEN ACEH TENGAH	4.082.266.000	4.047.644.721	99,152%

NO	UNIT KERJA	TOTAL PAGU		
		PAGU	REALISASI	%
23	KABUPATEN BOGOR	5.167.048.000	5.122.372.980	99,135%
24	KABUPATEN ACEH SELATAN	4.772.133.000	4.730.400.378	99,125%
25	KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR	5.446.007.000	5.395.693.019	99,076%
26	KABUPATEN BANYUMAS	5.518.389.000	5.466.688.462	99,063%
27	KABUPATEN MIMIKA	4.660.737.000	4.616.368.148	99,048%
28	KABUPATEN INDRAGIRI HULU	4.230.310.000	4.189.437.295	99,034%
29	KOTA LUBUKLINGGAU	4.091.081.000	4.048.527.188	98,960%
30	KOTA SUNGAI PENUH	3.748.937.000	3.700.732.411	98,714%
31	KABUPATEN REJANG LEBONG	4.387.682.000	4.320.234.828	98,463%
32	KOTA TANJUNGBALAI	3.105.444.000	3.054.188.596	98,349%
33	KOTA TANJUNGPINANG	3.695.100.000	3.620.461.057	97,980%
34	KABUPATEN MANGGARAI BARAT	4.140.470.000	4.048.536.450	97,780%
35	KABUPATEN BANGGAI	3.267.090.000	3.182.719.337	97,418%
36	KABUPATEN MERAUKE	3.283.683.000	3.196.907.958	97,357%
37	KABUPATEN TOBA SAMOSIR	3.691.178.000	3.579.138.529	96,965%
38	KABUPATEN DHARMASRAYA	3.307.844.000	3.200.523.263	96,756%
39	KABUPATEN BIMA	3.649.994.000	3.488.542.032	95,577%
	TOTAL SATKER LOKA	162.434.523.000	160.922.378.890	99,07%
	TOTAL SELURUH SATKER	2.028.593.343.000	2.015.201.098.442	99,34%



**KINERJA BPOM
DALAM ANGKA TRIWULAN IV
TAHUN 2022**



Jl. Percetakan Negara
Jakarta Pusat 10560



021 4244691



halobpom@pom.go.id



www.pom.go.id



@bpom_ri



Bpom RI